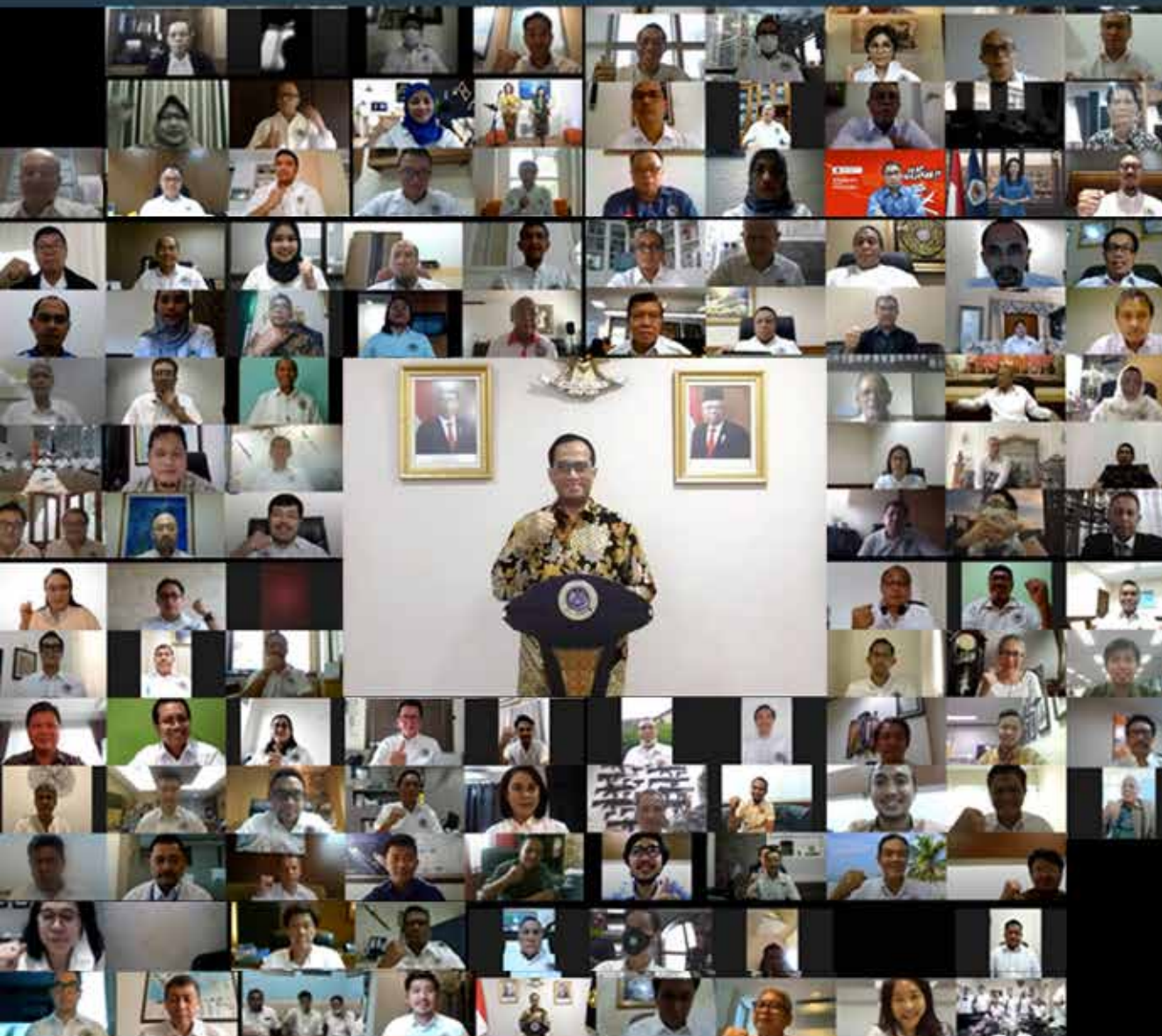


INSA NEWS



Published by Indonesian National Shipowners' Association

Edisi 14 2020



Pelantikan Pengurus DPP INSA Masa Bakti 2019-2023
di Era The New Normal

Daftar Isi

LAPORAN UTAMA

Hal. 4-5

Pelantikan Pengurus DPP INSA Masa Bakti 2019-2023 di Era The New Normal

Hal. 6-8

Menuju Era New Normal

Hal. 9-11

Kemenhub Terbitkan
Aturan Pengendalian
Transportasi

Hal. 12-13

Pelayaran Bersiap
Hadapi New Normal

Hal. 14-15

Tantangan Pelaut di
Era Kenormalan Baru

DUNIA PELAYARAN

• Perekonomian Nasional Tertekan Akibat Covid-19	17
• Dunia Usaha Perlu Stimulus yang Merata	18
• Pemerintah Gandeng Stakeholder Hadapi New Normal	19
• Kemenhub Imbau Angkutan Laut Bersiap Sambut New Normal	21
• Petunjuk Pelaksanaan Angkutan Laut Pada New Normal	22
• IMO Gelar Sidang Dewan Luar Biasa Secara Virtual	24
• Indonesia Masuk Grey List Tokyo MoU	26
• Ini Strategi Tol Laut Hadapi New Normal	28
• Mengenal E-Pilotage Pada Alur Pelayaran	30
• Skenario Operator Pelabuhan Sambut New Normal	32
• Menperin Usulkan Penggunaan LSF Ditunda	35
• Q1-2020, MBSS Rugi US\$ 2,1 Juta	36
• 14 Juni, Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Mulai Berlaku	37
• Pejabat Bakal Kena Sanksi Jika Proyek BUMN Tak Penuhi TKDN	38
• Tetap Sehat dan Fit di Tengah Pandemi Covid-19	39

SEPUTAR INSA

• Dialog Sepak Terjang Srikandi di Masa Pandemi	42
• Permasalahan Industri Pelayaran di Batam	43
• INSA di Webinar Tentang Pelaut	44
• Penetapan Hub Pelabuhan Perlu Didukung Berbagai Aspek	45
• Rapat New Normal Pengoperasian Kapal dan Pelabuhan	46
• INSA Bahas Tantangan Pelayaran dengan Menperin	47
• DPC INSA Surabaya Bagikan 150 Paket Sembako dan 100 APD	48

INSA FOTO

• Ketum INSA Menjadi Narsum di Acara Diskusi Nasional	50
• Rapat Persiapan Ratifikasi Konvensi Hongkong	51
• INSA Hadiri Rapat Kemendag	52
• Kolaborasi dan Strategi Hadapi New Normal	53
• Rapat Bersama BKPM	54
• Sosialisasi Tata Cara Penyampaian Data Penggunaan Angkutan Laut Nasional	55



Pimpinan Umum:
Carmelita Hartoto

Wakil Pimpinan Umum/
Penanggung jawab :
Budhi Halim

Pimpinan Redaksi:
Darmansyah

Pimpinan perusahaan
Nova Mugijanto

Redaktur
Capt. Zaenal A. Hasibuan

Reporter:
Fajar Sudrajat
Hilman Muhammad

Fotografer :
Team INSA

Desainer grafis:
Andriansyah MK

Published by:



Jl. Tanah Abang III No 10, Jakarta
Pusat.
T: (62-21) 3850993, 3447149, 3849522
F: (62-21) 3849522
Email: info@insa.or.id
©: @dppinsa
www.insa.or.id



Pelantikan Pengurus DPP INSA Masa Bakti 2019-2023

di Era The New Normal

Di era new normal, pelantikan pengurus Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) masa bakti 2019-2023 digelar secara virtual pada Jumat, 19 Juni 2020.

Meski acara digelar secara virtual, namun tidak mengurangi kekhidmatan dan antusias pengurus dan anggota serta tamu undangan mengikuti acara dari awal sampai akhir.

Acara pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023 dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam sambutannya, Menhub Budi mengucapkan selamat kepada Pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 di bawah kepemimpinan Carmelita Hartoto yang baru saja dilantik.

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023,” kata Menhub Budi.

Pelantikan ini dilakukan setelah Ketua Umum terpilih yang didampingi oleh Formatur Pendamping telah rampung membentuk susunan pengurus yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA.

Ketua Umum INSA terpilih Carmelita Hartoto mengatakan, pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 memiliki tanggung jawab besar, karena tantangan yang dihadapi pelayaran nasional semakin berat seiring mewabahnya Covid-19. Untuk itu, pengurus DPP INSA 2019-2023 harus lebih solid dan bekerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan guna memajukan pelayaran nasional.

“Kepengurusan yang baru ini harus semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara INSA dengan pemerintah dan seluruh stakeholder,” kata Carmelita.

Carmelita menuturkan INSA terus berupaya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemajuan industri pelayaran nasional. Isu-isu pelayaran nasional pun telah disusun menjadi program kerja Pengurus DPP INSA 2019-2023 yang harus diperjuangkan.

Carmelita mengatakan, kinerja pelayaran nasional sangat terpuak akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan hampir merata pada seluruh sektor pelayaran. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan stimulus dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

Dari sisi fiskal, stimulus yang dibutuhkan antara lain pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Pengusaha pelayaran

nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negosiasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.

Lain itu, INSA juga telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait new normal (kenormalan baru) khususnya mengenai kelancaran pengoperasian kapal.

Beberapa masukan tersebut antara lain untuk kapal penumpang jarak dekat mohon pertimbangan dan perhatian mengenai syarat protokol kesehatan yang practicable dan tetap safe. Untuk kapal-kapal Bulk Carrier dan General Cargo yang menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di atas kapal, baik yang sandar maupun transshipment di laut, agar para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengikuti protokol kesehatan dibawah pengawasan Syahbandar setempat.

Lalu, dokumen-dokumen safety certificate dan registrasi agar dijalankan secara full online di Kementerian dan Kepelabuhanan, agar menghindari kontak personal, tata cara dan kegiatan crew change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia,

dan tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini pengurus harus lebih aktif dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pelayaran, dan program kerja yang diamanahkan dalam RUA dapat dijalankan dengan baik.” pungkasnya.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema “Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju”. Adapun isu-isu yang akan diangkat pada webinar ini mengenai Navigating The Covid-19 Crisis Through Managing Maritime Industry In Indonesia, Penegakan Hukum di Laut Teritorial Indonesia dalam Menuju Kemajuan Ekonomi Nasional, dan Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Kapal Selama Pandemi.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini. Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Dr. Wisnu Handoko M. Sc, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S. T, MH, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (*)

MENUJU ERA NEW NORMAL



Karena itu, pemerintah telah menerbitkan protokol tatanan normal baru (new normal) bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan roda perekonomian berjalan lambat. Hampir semua sektor usaha tergerus pendapatannya, bahkan ada yang menghentikan secara total kegiatan operasionalnya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak berpenghasilan karena terkena PHK.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) salah satu cara pemerintah mencegah penyebaran Covid-19. Disisi lain, roda perekonomian harus tetap berjalan di tengah Covid-19 dengan mengedepankan upaya-upaya pencegahan.

Menteri Kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto mengatakan, dunia usaha dan masyarakat pekerja memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas, serta interaksi penduduk umumnya disebabkan aktifitas bekerja.

“Tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor risiko yang perlu diantisipasi penularannya,” kata Terawan seperti dikutip laman resmi Kementerian Kesehatan, Kamis (28/05/2020).

PSBB dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun, dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan.

Untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 atau New Normal,” tuturnya.

Menteri Kesehatan juga menerbitkan surat edaran tentang protokol pencegahan pada 20 Mei 2020, yang ditujukan bagi Pimpinan Kementerian Pembina Sektor Usaha, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Surat edaran dengan nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 itu tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

Protokol pencegahan penularan Covid-19 itu berlaku bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area publik).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan bahwa Indonesia akan menuju tatanan normal baru (New Normal). Artinya, kondisi dimana masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus Covid tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” ujar Jokowi.

Pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, Rabu (27/5), Jokowi menyampaikan arahan terkait hal tersebut.

Pertama, aparat dari TNI dan Polri yang telah diterjunkan ke lapangan, ke titik-titik keramaian di 4 provinsi serta 25 kabupaten dan kota.

Kedua, Presiden minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Ketiga, tatanan baru ini akan dicoba di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki R0 yang sudah di bawah 1 dan juga pada sektor-sektor tertentu yang dilihat di lapangan bisa melakukan dan mengikuti tatanan normal baru yang ingin dikerjakan.

Keempat, dalam rangka persiapan menuju tatanan normal baru ini, Presiden juga minta tolong dicek tingkat kesiapan setiap daerah dalam mengendalikan virus ini.

“Untuk daerah-daerah yang masih tinggi, yang kurvanya masih naik, saya kemarin juga sudah perintahkan kepada Gugus Tugas, kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk di Jawa Timur misalnya untuk kita tambah bantuan pasukan, aparat di sana agar bisa menekan kurvanya agar tidak naik lagi,” kata Jokowi seperti dikutip setkab.go.id.

Susun Skenario

Pemerintah akan membuat berbagai skenario guna memperkuat segi kesehatan dan penyesuaian kegiatan ekonomi pada kenormalan baru.

Untuk itu, Menko Perekonomian sampaikan penyusunan skenario kenormalan baru agar bisa menekan korban dari Covid-19, di samping itu juga bisa menekan korban dari pemutusan hubungan kerja, dan me-restart sosial ekonomi.

“Jadi kalau lihat dari skenario tingkat infeksi atau mortality tinggi dan rendah, kemudian pemulihan lambat dan resesi berat, dan pemulihan cepat yang diharapkan adalah Indonesia keluar dengan V shape atau kita kenal dengan tema produktif dan aman Covid-19,” imbuhnya.

Soal aspek yuridis, menurutnya, adalah sesuai dengan pelaksanaan masyarakat produktif dan aman Covid-19 terkait dengan regulasi PSBB.

“Bahwa PSBB ini secara yuridis penetapannya oleh Menteri Kesehatan (Menkes), demikian pula untuk pengakhirannya apabila belum waktunya juga persetujuan Menteri Kesehatan. Namun apabila selesai jangka waktunya, maka ini akan secara otomatis berakhir,” katanya.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian juga sampaikan Pemerintah mendorong agar kehidupan berjalan ke arah normal sambil memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Ia menambahkan bahwa data yang terjadi di lapangan ini pemerintah akan satu data, yaitu koordinasi dengan BNPB, Bappenas, dan data akhir berada di BNPB sehingga seluruh data nanti akan dikumpulkan di BNPB.

Kemudian mendorong pemulihan ekonomi dengan pembukaan kegiatan atau penyesuaian kegiatan ekonomi setelah kurva melandai, dan melakukan kegiatan berbasis dorongan fiskal dan moneter, sehingga diharapkan bisa keluar dari resesi ekonomi,” tuturnya. (*)

“Kita diminta memang untuk beradaptasi dengan virus Covid-19. Dan tentunya selama vaksin belum ditemukan, imunisasi belum dilaksanakan dan belum terdistribusi secara luas maka diperkirakan membutuhkan waktu dan oleh karena itu dipersiapkan kenormalan baru (new normal),” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

KEMENHUB TERBITKAN ATURAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI

Menghadapi era kenormalan baru (new normal) pada sektor transportasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

KEMENHUB TERBITKAN ATURAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aturan ini terbit guna menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

“Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” kata Menhub Budi seperti tulis laman dephub.go.id, Rabu (10/6/2020).

Menhub Budi menjelaskan, dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi. Karena itu, Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan Permenhub 18/2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena kami berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik itu petugas transportasi maupun penumpang tetap bisa produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19 sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo,” jelasnya.

Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan untuk wilayah yang ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengendalian transportasi dilakukan kepada transportasi darat (umum, pribadi, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan), laut, udara dan perkeretaapian.

Para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan physical distancing mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan.

“Terkait pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi akan ditetapkan selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian di kemudian hari,” tuturnya.

Surat Edaran Menhub tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut yaitu, SE Nomor 11/2020 untuk transportasi darat, SE Nomor 12/2020 untuk transportasi laut, SE Nomor 13/2020 untuk transportasi udara, dan SE Nomor 14/2020 untuk transportasi perkeretaapian.

Beberapa revisi pada pasal-pasal dari Permenhub 18/2020, diantaranya :

- Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50 persen, pada Permenhub 41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran. Misalnya : di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan.
- Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat membawa penumpang dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan seperti : melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit.

- Terkait pengendalian transportasi udara yaitu penyesuaian kapasitas (slot time) bandara berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenhub.
- Terkait penerapan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif tersebut mulai dari mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.
- Terkait sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh berbagai unsur seperti : Menhub, Panglima TNI, KaPolri, Gubernur, Bupati/Walikota, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis Kemenhub dan para operator transportasi.

Sebagai informasi, melalui SE Gugus Tugas Nomor 7/2020, telah ditetapkan kriteria dan persyaratan bagi individu untuk bepergian. Dimana kriteria yang harus dipenuhi bagi semua orang yang akan bepergian yaitu wajib mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

Kemudian, terkait persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk dapat bepergian yaitu: Untuk perjalanan orang dalam negeri wajib menunjukkan identitas KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan, atau dapat menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan Rapid Test.

Dengan catatan, seluruh persyaratan perjalanan orang dalam negeri tersebut dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi. Selanjutnya, untuk persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri, diharuskan melakukan tes PCR pada saat ketibaan bila belum melaksanakan tes dan apabila tidak dapat menunjukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan.

Pemeriksaan PCR dikecualikan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tidak memiliki peralatan PCR, digantikan dengan tes rapid dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas.

Gugus Tugas juga meminta masyarakat untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi “Peduli Lindungi” pada perangkat telepon seluler yang bisa diunduh melalui Playstore atau Appstore.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang akan bepergian keluar masuk DKI Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta 47/2020 tentang Surat Izin Keluar/Masuk DKI Jakarta. (*)



PELAYARAN BERSIAP HADAPI NEW NORMAL

Kinerja keuangan sektor transportasi laut dibikin 'ambyar' oleh pandemi Covid-19. Penurunan kinerja keuangan hampir terjadi pada seluruh bidang angkutan laut. Paling terdampak adalah angkutan Ro-Ro dan penumpang karena hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas kapal. Sedangkan angkutan barang penurunannya rata-rata 30%, dan untuk angkutan minyak dan gas (migas) penurunannya 15%.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Budhi Halim mengatakan, di era kenormalan baru (new normal) diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan bisnis kembali menggeliat.

"Di era pandemi Covid-19 ini, kita sangat terpukul sekali," kata Budhi di acara Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi Covid-19 dan Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Transportasi, Selasa (02/06/2020).

Pada kesempatan tersebut, Budhi menyampaikan beberapa masukan dari pengusaha angkutan laut kepada Kementerian Perhubungan terkait pengoperasian kapal dan kepelautan dalam menghadapi era kenormalan baru.

Pertama, penerapan protokol kesehatan yang seragam antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah tidak lagi menolak pemberlakuan crew change di pelabuhan Indonesia.

Kedua, petugas karantina di pelabuhan agar lebih berperan aktif/jemput bola untuk menghindari antrean kapal saat proses pengetesan. Saat ini kapal-kapal harus antre 2-3 hari untuk diperiksa dan ini merugikan pelayaran.

"Jadi kita mohon benar-benar dari petugas karantina agar jemput bola. Kapal kalau satu hari itu (delay) sudah ribuan dolar ruginya, belum lagi di next port kita ditunggu. Ini akan mengganggu kelancaran logistik nasional," katanya.

Ketiga, persyaratan rapid test pada angkutan Ro-Ro dan penumpang jarak dekat sebaiknya ditiadakan karena biayanya cukup mahal. Rapid test bisa digantikan dengan menerapkan penggunaan thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh penumpang.

Keempat, memberi kemudahan bagi para pelaut untuk naik turun kapal. Hal ini tertuang dalam Circular IMO Nomor 4204/Add.14 tertanggal 05 May 2020, yang menggolongkan pelaut dan pekerja maritim sebagai key workers dalam menunjang kelangsungan hidup suatu bangsa, terlepas apapun Nationality-nya. Agar pelaut dan pekerja maritim diberikan kemudahan pergi bekerja, naik turun kapal, ataupun transit.

Kelima, prosedur pemeriksaan rapid test bagi pelaut agar diseragamkan dan diberikan masa tenggang yang cukup, mulai dari perjalanan hingga naik ke kapal. Terakhir, Budhi bilang, sertifikasi keterampilan pelaut dan sertifikasi kapal agar dilakukan secara online.



Sementara itu, dari sisi manajemen perusahaan pelayaran juga harus bersiap menghadapi era kenormalan baru.

Managing Director PT Temas Tbk. Faty Khusumo mengatakan, langkah yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi era kenormalan baru adalah dengan memperketat protokol kesehatan di kantor dan kapal. Faty menyebutkan, upaya yang dilakukan diantaranya menempelkan poster dan flyer himbauan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker, menyediakan obat-obatan, melakukan pengecekan suhu, larangan penerbangan, penyemprotan cairan disinfektan secara rutin.

Lalu, sambung Faty, perusahaan juga melakukan pantauan absen. Bagi karyawan yang sakit wajib melapor serta karyawan wajib melakukan perawatan mandiri di rumah dan perkembangan kesehatannya akan dipantau.

"Dengan adanya Covid-19 ini semua bisa lebih aware terhadap personal hygiene. Semoga vaksin bisa secepatnya ditemukan," tutur Faty.

Senada dengan PT Temas, PT Pelni tengah menggalakkan protokol kesehatan dari berbagai bidang mulai dari karyawan, anak buah kapal (ABK) hingga penumpang di setiap pelabuhan yang dilayari Pelni. Selain itu, keseragaman pemeriksaan dan penyediaan fasilitas yang memenuhi standar menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi new normal.

VP Corporate Planning PT Pelni Andi Samsul Hadi menuturkan perusahaan juga mempercepat akselerasi digitalisasi hampir di seluruh bidang. Dari sisi ticketing sudah berjalan cukup lama dan akan terus ditingkatkan, termasuk pelayanan serta digital control systems (DCS).

"Jadi penerapan digitalisasi akan menjadi suatu keharusan bagi semua operator," ujar Andi.

Andi menambahkan strategi yang akan diterapkan pada era new normal harus selaras dengan kepentingan kesehatan dan ekonomi. (*)



TANTANGAN PELAUT DI ERA KENORMALAN BARU



Pandemi Covid-19 telah mengancam berbagai aspek kehidupan. Pelaut atau orang yang bekerja di atas kapal ikut merasakan dampaknya. Dimana, banyak negara yang melarang atau mempersulit pergerakan pelaut di tengah wabah Covid-19.

Berbagai aturan sudah dikeluarkan guna mencegah penyebaran Covid-19 di atas kapal seperti Surat Edaran Perhubungan Laut No: SE. 11 Tahun 2020, Circular Letter No. 4202/Add.4 International Chamber of Shipping (ICS), Circular Letter No. 4202/Add.3 World Health Organization (WHO), dan Circular Letter No. 4202/Add.2 Joint Statement WHO-IMO. Namun, sejumlah tantangan masih harus dihadapi pelaut di era new normal.

Ketua Bidang SDM Pelaut DPP INSA Johan Novitrian mengatakan, kondisi di atas kapal sudah sangat sulit lantaran adanya pembatasan masuk pelabuhan di Indonesia dan di sejumlah negara. Hal ini menyebabkan port clearance (penerbitan surat persetujuan belayar) menjadi terlambat, dan terburuknya kapal tidak diizinkan masuk.

Kendala ini, lanjut Johan, sudah dirasakan pada kapal-kapal penumpang yang mencari tempat untuk berlabuh supaya diperbolehkan masuk hanya sekedar mengisi makanan, bahan bakar, dan air, namun tidak diperbolehkan sampai waktu yang ditentukan.

“Efek dari port entry restrictions ini atau penutupan pelabuhan menyebabkan tidak boleh melakukan crew change,” kata Johan di webinar Perlindungan Hukum Pelaut dan Protokol Kesehatan Untuk Pelaut Dalam Masa Pandemi Covid-19, Rabu (03/06/2020). Johan bilang, yang masih harus dicermati setelah crew change dibuka adalah pelaksanaan protokol kesehatan pada saat kru turun dan naik di atas kapal. Hal ini menjadi faktor utama penentu kondisi aman di atas kapal dari Covid-19.

“Sampai sekarang agak sulit ya memantau karena di kapal sendiri masih tidak ada terjadinya rotasi atau crew change. Karena masih di isi kru yang lama yang tidak pulang sampai waktu belum ditentukan,” tuturnya.

Kemudian, dikatakan Johan, protokol kesehatan juga perlu diterapkan pada sektor-sektor yang berhubungan dengan industri pelayaran untuk mitigasi penyebaran Covid-19.

Johan mengungkapkan DPP INSA juga telah memberi masukan di bidang kepelautan kepada Kementerian Perhubungan dalam menghadapi new normal. Diantaranya adalah tata cara dan kegiatan Crew Change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia. Hasil pemeriksaan Rapid test harus memiliki validasi untuk durasi yang seragam di semua pelabuhan Indonesia dan harus diterima hasil test dari klinik yang berwenang untuk mendapatkan Certificate of Examination dari Port Health officer.

Lalu, agar tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal. Syahbandar setempat atas perintah dari Dirjen Hubla agar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Kementerian Perhubungan untuk membuat Standard Guidance untuk crew change supaya tidak terjadi delay yang panjang yang dapat menimbulkan biaya tinggi seperti akomodasi selama menunggu hasil, double rapid test, terutama untuk crew yang tempat mobilisasinya jauh.

Meminta Kemenhub membuat Juklak tata cara pelaksanaan pelayanan terhadap embarkasi/debarkasi penumpang kapal-kapal perintis sesuai Protokol Covid-19. Kemudian, diberikan kemudahan juga terhadap pergantian crew asing

yang bekerja dikapal, saat kapalnya berada di pelabuhan Indonesia. Dan pengurusan sertifikasi keterampilan pelaut dilakukan secara online.

Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) dr. Hesti Ekawati menambahkan bahwa protokol kesehatan yang diterbitkan baik dari internasional maupun dalam negeri sudah cukup menjadi patokan bagi pelaut. Dikatakannya, saat ini BKKP tengah menyusun petunjuk pelaksana (juklak) dalam menghadapi new normal.

“Sesuai dengan sidang IMO melalui zoom, akan ada penambahan item pemeriksaan bagi pelaut dengan standar yang lebih tinggi. Kami juga lagi menunggu apakah Indonesia juga bisa melaksanakan hal tersebut,” pungkas dr. Hesti.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri per 02 Juni 2020 disebutkan ada 23.570 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia bekerja di atas kapal niaga asing yang terdampak Covid-19. Kementerian Luar negeri sejak pertengahan Maret lalu telah mengupayakan agar ABK bisa segera pulang. Hingga kini sudah 20.443 ABK sudah berhasil pulang ke Tanah Air. (*)

DUNIA PELAYARAN

PEREKONOMIAN NASIONAL TERTEKAN AKIBAT COVID-19

Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional melambat. Ekonomi Indonesia triwulan I 2020 tumbuh 2,97% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, penurunan ini terutama berasal dari melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non makanan, dan investasi dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan subsektor transportasi.

Sementara, lanjut Onny, ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia tetap baik. Hal itu tercermin dari defisit transaksi berjalan triwulan I 2020 yang menurun menjadi 1,4% PDB dari 2,8% PDB pada triwulan IV-2019 dan cadangan devisa yang tetap besar.

Nilai tukar Rupiah, kata Onny, kembali menguat pada April 2020 seiring meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan terjaganya kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.

“Selain itu, kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, kendati potensi risiko meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 perlu terus diantisipasi,” kata Onny seperti dikutip bi.go.id, Selasa (02/06/2020).

Onny mengungkapkan, BI menempuh berbagai respons kebijakan guna memitigasi risiko dampak Covid-19 terhadap perekonomian. BI terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut dengan berkoordinasi erat dengan pemerintah, OJK, LPS dan otoritas terkait lain.

Terdapat lima kebijakan BI untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga BI 7-days Reverse Repo Rate (BI-7DRR), menyediakan dana likuiditas antara lain melalui repo SBN dan penurunan GWM, pelonggaran kebijakan makroprudensial serta menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun nontunai.

Onny menambahkan BI akan terus memperkuat koordinasi ini dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi dunia triwulan I 2020 di banyak negara juga menurun tajam sejalan meluasnya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi seperti di Tiongkok, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina mengalami kontraksi pada triwulan I 2020, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) turun dalam menjadi 0,3%.

Risiko resesi ekonomi global pada April 2020 tetap besar tercermin pada kontraksi berbagai indikator dini seperti kinerja sektor manufaktur dan jasa serta keyakinan konsumen dan bisnis. (*)

DUNIA USAHA PERLU STIMULUS YANG MERATA

Pengusaha berharap pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas basis debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit, sehingga tidak terbatas pada debitur dengan plafon pinjaman Rp10 miliar. Karena itu, pemerintah diharapkan segera memformulasikan stimulus dunia usaha yang lebih masif guna menekan dampak Covid-19.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini kondisi yang dirasakan akibat dampak Covid-19 bukan cuma sektor UMKM, namun juga sudah merambah ke industri besar yang salah satunya adalah industri pelayaran.

“Sejak sebulan masa pandemik Covid-19 di Indonesia, angkutan laut untuk penumpang sudah mengalami penurunan sebesar 50-70%, ditambah lagi dengan adanya kebijakan PSBB dan pembatasan pergerakan orang, jumlah arus penumpang bisa dikatakan turun 100%. Sedangkan biaya operasional kapal tetap berjalan, termasuk biaya investasi berupa pokok dan bunga pinjaman bank,” kata Carmelita seperti dikutip Sindonews.com, Rabu (13/5/2020).

Dalam satu bulan terakhir, lanjut Carmelita, sektor angkutan kontainer telah mengalami penurunan volume karena dampak dari pembatasan operasional sektor industri di beberapa tempat. Di tengah situasi yang terjadi tersebut, pelaku usaha angkutan kontainer mengalami kesulitan pembayaran tagihan dari pelanggan. Di sisi lain operasional perusahaan harus tetap dijaga agar berjalan dengan baik terutama yang terkait dengan faktor keselamatan.

Lalu, dikatakan Carmelita, turunnya harga minyak disaat pandemik Covid-19, juga sangat berdampak pada sektor angkutan migas dan pelayaran lepas pantai (offshore). Sebagian besar perusahaan minyak melakukan efisiensi dan salah satunya adalah meninjau ulang harga sewa kapal hingga turun 30-40%. Beberapa sektor angkutan laut tersebut sudah merasakan himpitan yang besar seiring tekanan dari dampak Covid-19 yang melumpuhkan sebagian sektor ekonomi.

Menurut Carmelita, perlu dilakukan langkah cepat tepat dan berkesinambungan, dengan risiko yang terukur. Dan itu tidak bisa ditunda lagi, harus segera dilakukan, untuk melengkapi paket kebijakan pemerintah sebelumnya seperti stimulus pajak. Jika tidak, kondisi negatif cashflow yang dialami saat ini dalam waktu dekat akan mengakibatkan perusahaan berhenti beroperasi dan akan banyak korban PHK.

“Perlu diingat bahwa membangun kembali industri pelayaran memerlukan waktu yang lama dan industri pelayaran merupakan infrastruktur maritim yang menjadi tulang punggung bagi negara maritim seperti Indonesia,” ungkapnya.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Mohamad Faisal mengatakan, tidak hanya pemerintah pusat namun sudah saatnya bank sentral ikut aktif berperan membantu krisis pandemik Covid-19 secara nyata dengan mengucurkan likuiditas kepada sektor-sektor ekonomi.

“Paling ekstrem ya bisa dilakukan dengan mencetak uang. Tapi karena kondisi saat ini saya kira itu tidak salah dilakukan selama risikonya terukur. Apalagi sebelum masa pandemik Covid terjadi di dalam negeri masih kekurangan likuiditas,” tuturnya. Faisal menjelaskan porsi PDB nasional hanya sekitar 40% dari jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga saat ini dibutuhkan banyak uang yang dalam bentuk cash. Bank sentral harus berpikir out of the box dan ikut andil menyelamatkan perekonomian. (*)

PEMERINTAH GANDENG STAKEHOLDER HADAPI NEW NORMAL

Hampir semua lini usaha dibuat berantakan oleh Covid-19, termasuk sektor transportasi. Jurus baru sedang disiapkan pemerintah agar roda perekonomian kembali berputar sehingga bisnis kembali berjalan. Pemerintah tengah menggaungkan New Normal atau Tatanan Normal Baru, dimana masyarakat bisa beraktivitas secara produktif di tengah pandemik covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan mengajak seluruh stakeholder memberikan masukan yang inovatif guna memformulasikan suatu kebijakan menghadapi new normal yang mengedepankan sisi kemanusiaan, kesehatan, dan ekonomi.

Langkah awal yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Litbang Perhubungan (Balitbanghub) adalah menggandeng akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk melakukan kajian yang nantinya bisa dijadikan rumusan dalam menyusun kebijakan pada sektor transportasi di era new normal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tatanan normal baru membawa dua keuntungan. Pertama, tatanan normal baru akan menjaga Indonesia dari

ancaman pandemik covid-19. Kedua, mendukung keberlanjutan bangsa Indonesia agar tidak terpuruk oleh permasalahan baru lainnya, yaitu krisis ekonomi, ancaman ketahanan pangan, keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak bangsa.

“Saya optimis bahwa tatanan normal baru akan memberikan hikmah lain terhadap ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Kementerian Perhubungan berkomitmen segera menyiapkan kebijakan dalam menyongsong kehidupan normal baru yang tetap menjaga protokol kesehatan,” kata Menhub Budi saat membuka acara “Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi COVID-19 dan Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Transportasi” yang digelar secara daring, Selasa (02/06/2020).

Selain akademisi, Menhub Budi juga mengajak stakeholder lainnya agar dapat memberikan masukan dan strategi, khususnya terkait upaya mengatasi dampak pandemik covid-19. Diharapkan Indonesia bisa bangkit, lebih produktif dan berkualitas dalam tatanan normal baru secara berkelanjutan.

Sementara dari sektor keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan semua negara mengalami tantangan yang tidak mudah untuk menangani Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat, ganas, dan menciptakan korban manusia.

Dikatakan Menkeu, berbagai langkah yang dilakukan semua negara mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), lockdown, dan karantina yang telah memukul kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dilema-lema kebijakan yang dihadapi Indonesia sama dengan yang dihadapi semua negara.

Menkeu menjelaskan, tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana membangun suatu normal baru. Dimana selama Covid-19 belum ditemukan obat atau anti virusnya, maka semua pemangku kepentingan harus menyeimbangkan kebutuhan dari sisi kesehatan tetap prioritas, namun juga bisa menciptakan ruang untuk interaksi sosial dan ekonomi.

“Inilah yang sedang kita siapkan. Oleh karena itu, pemikiran dan kerja sama dengan dunia akademis dan seluruh stakeholder sangat penting. Bagaimana kita mendesain suatu normal baru, bagaimana kita bisa membuat masyarakat tetap memiliki kondisi aktivitas yang produktif namun aman dari Covid-19,” kata Menkeu. Kementerian Keuangan, Diakui Menkeu, memang diminta dan bertanggung jawab untuk bisa mendesain kebijakan fiskal didalam

mendorong dan memulihkan ekonomi nasional sambil terus menangani isu Covid-19. Disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 menjadi UU, lanjut Menkeu, menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan guna merespon tantangan Covid-19.

Seperti kebijakan di bidang fiskal untuk bisa mendukung langkah-langkah yang sifatnya luar biasa dalam situasi yang luar biasa dan dengan kecepatan yang dituntut untuk sangat tinggi.

“Inilah yang kita lakukan dalam menghadapi Covid-19. Sehingga kita mampu merespon kebijakan seperti tuntutan dari masyarakat. Cepat namun aman, cepat namun hati-hati, hati-hati namun kita efektif. Itu semua harus terus dilakukan secara terampil, secara cerdas, dan juga harus berpegang kepada rambu-rambu mengenai kesehatan,” tegasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamiluddin mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa untuk mengubah cara hidup masyarakat, namun masyarakat belum siap untuk menghadapinya.

Menurut Ridwan, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi Covid-19 ke depannya. Pertama,

teknologi menjadi kunci yang artinya masyarakat akan sangat mengandalkan teknologi. Kedua, manusia harus semakin independen, maksudnya tidak selalu mengandalkan orang lain.

Di sisi transportasi, Ridwan bilang, merupakan salah satu sektor yang menjadi pengendali laju meluasnya penyebaran Covid-19. Tak hanya itu, prilaku masyarakat yang disiplin juga menjadi kunci dalam mengendalikan lajunya infeksi.

“Ketika PSBB di Jakarta dilakukan, kita masih bisa melihat penurunan transportasi itu kalau dikalkulasi tinggal 20%. Tapi kalau kita pulang kantor jam 4 itu lalu lintas di Jakarta mungkin kira-kira masih 70-80% kepadatannya,” ujar Ridwan.

Dari sisi pelaku usaha transportasi laut yang diwakili Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim berkesempatan memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholder dalam menghadapi new normal pada transportasi laut. Seperti, adanya keseragaman penerapan protokol kesehatan bagi penumpang dan anak buah kapal (ABK), dan pengurusan sertifikasi dilakukan penuh secara online.

“Sejak diterapkannya PSBB, angkutan Ro-Ro/Penumpang paling terdampak penurunannya. Sedangkan logistik mengalami penurunan rata-rata 30% terutama untuk angkutan muatan. Kecuali untuk migas, penurunannya 15%,” ungkap Budhi. (*)



KEMENHUB IMBAU ANGGUTAN LAUT BERSIAP SAMBUT NEW NORMAL

Pemerintah akan memberlakukan kondisi new normal, yaitu suatu perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Ini dilakukan agar ekonomi nasional segera pulih.

Pemberlakuan kondisi new normal ini kemungkinan besar akan di mulai tanggal 7 Juni 2020. Terkait dengan hal ini, maka seluruh unsur dan lapisan masyarakat diharapkan dapat mendukung kebijakan new normal ini termasuk pada sektor angkutan laut.

Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Makassar sekaligus memimpin Rapat Pembahasan Kesiapan Antisipasi Pembatasan Perjalanan Arus Balik dan Protokol Covid Rapid Test/PCR Swab bagi Penumpang Angkutan Laut di Pelabuhan Utama Makassar, Rabu (27/5).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, guna mengantisipasi pemberlakuan kondisi new normal pada angkutan laut, semua jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan stakeholder terkait harus

segera menyiapkan diri untuk menghadapi situasi baru ini. Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus tetap mendukung upaya pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 melalui transportasi laut.

“Prinsip utamanya adalah pengaturan transportasi laut dengan tetap menyesuaikan peradaban hidup yang baru, yaitu dengan mengatur secara ketat protokol kesehatan Covid-19 dengan memberikan pengawasan secara optimal pada tempat-tempat yang rentan berkumpulnya orang termasuk pada sektor angkutan laut seperti selalu menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, tetap memakai masker dan physical distancing,” kata Wisnu seperti dikutip hubla.dephub.go.id, Kamis (28/05/2020).

Karena itu, sambung Wisnu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan mengikutsertakan Operator BUMN yaitu PT. Pelni dan para Operator swasta lainnya berkaitan dengan penyediaan tiket angkutan laut dengan tetap menegakan aturan protokol covid-19, penumpang harus melengkapi syarat-syarat seperti harus adanya surat kesehatan bebas covid-19 dari hasil rapid test, PCR/Swab test dan syarat lain yang telah ditetapkan ketika penumpang akan naik kapal.

“Bagi calon penumpang angkutan laut yang akan naik kapal apabila tidak melengkapi persyaratan sesuai SOP Protokol Covid-19 tentunya tidak boleh dilayani atau diberikan ijin untuk ikut naik ke kapal,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menuturkan bahwa selama ini di Pelabuhan Makassar telah terbentuk dan aktif bertugas Satgas Terpadu Covid-19 Transportasi Laut di Provinsi Sulawesi Selatan. Satgas Terpadu ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penegakkan hukum bagi perjalanan orang yang menggunakan transportasi laut melalui Pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Intinya Pelabuhan Makassar dan semua pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung apabila kebijakan pemerintah terkait penerapan new Nnormal yang akan dimulai pada 07 Juni 2020, karena semua pelabuhan di Sulawesi Selatan telah menyiapkan pengawasan dan pengendalian sesuai protokol Covid-19 termasuk pengawasan dalam penjualan ticket oleh Operator Kapal maksimal 50% dari kapasitas kapal agar physical distancing bisa diterapkan,” pungkas Rahmatullah. (*)

PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGKUTAN LAUT PADA NEW NORMAL



Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan aturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020.

Surat Edaran ini terbit menyusul telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

“Surat Edaran ini tidak lagi mengatur siapa yang pergi atau membatasi siapa yang naik. Tetapi siapapun boleh berpergian dengan kapal laut namun harus tetap memenuhi prinsip protokol kesehatan termasuk physical distancing,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo seperti dikutip hubla.dephub.go.id, Rabu (10/06/2020).

Agus menjelaskan, pengoperasian transportasi laut pada kenormalan baru ini telah ditetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap penumpang, operator kapal penumpang, operator terminal penumpang dan Syahbandar pada pelabuhan embarkasi/debarkasi.

Dicontohkannya, penumpang memiliki tanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Lalu, sambung Agus, setiap penumpang wajib menunjukkan tiket, boarding pass, identitas diri beserta dokumen persyaratan lainnya. Khusus bagi penumpang yang berasal dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat kedatangan di pelabuhan dalam negeri.

Selain itu, setiap penumpang diminta agar mengaktifkan aplikasi “Peduli Lindungi” pada perangkat telepon seluler yang bisa diunduh melalui Appstore ataupun Playstore. Agus menegaskan bahwa kapasitas penumpang disesuaikan dengan karakteristik kapal dengan tetap menggunakan prinsip protokol kesehatan.

Begitupun bagi operator kapal penumpang dan operator terminal penumpang, wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bebas Covid-19 secara rutin serta selalu menerapkan protokol kesehatan terhadap karyawan, awak kapal ataupun personil operasional lainnya, yang meliputi jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan.

Fasilitas tempat cuci tangan, hand sanitizer dan penyediaan masker di atas kapal dan di terminal penumpang juga wajib disediakan, termasuk penyediaan sarana pengecekan (check point) pada akses utama keluar/masuk terminal penumpang.

Hal penting lain yang harus dilakukan operator kapal yakni memastikan calon penumpang memenuhi dokumen persyaratan perjalanan sebelum diberikan tiket, menerapkan jaga jarak dan mengatur antrian di loket tiket serta tetap memberikan layanan pemesanan tiket tanpa menaikan tarif serta melayani proses refund/reroute/reschedule bagi penumpang. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang saat keluar/masuk pelabuhan, penyiapan prosedur tetap penanganan keadaan darurat dan penyediaan akomodasi karantina khusus di pelabuhan menjadi kewajiban operator terminal penumpang.

Dalam Surat Edaran ini juga mengatur tanggung jawab Syahbandar pada pelabuhan embarkasi/pelabuhan debarkasi dalam melakukan tindakan pengawasan. Sebagai regulator di pelabuhan, Syahbandar tentu harus selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 seperti jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan.

Adapun tugas disiplin dan pengawasan protokol kesehatan Covid-19 tersebut dilakukan Syahbandar bersama-sama dengan unsur

Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, operator terminal dan instansi terkait lainnya.

Syahbandar dapat menunjuk petugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD), juga berhak menghentikan atau melakukan pelanggaran perjalanan penumpang yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaannya.

“Intinya, pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena Kementerian Perhubungan berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik itu petugas maupun penumpang tetap bisa produktif namun tetap aman dari potensi penyebaran Covid-19 sebagaimana arahan Bapak Menhub,” pungkasnya. (*)



IMO GELAR SIDANG DEWAN LUAR BIASA SECARA VIRTUAL

“Ini adalah sesi diskusi informal secara virtual yang pertama, selanjutnya masih akan ada sesi diskusi informal lagi yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni dan 3 Juli 2020,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha dalam siaran persnya.



Akibat Pandemi Covid-19, Dewan International Maritime Organization (IMO) menggelar Informal Session IMO Council Extraordinary atau Sesi Informal 1 Sidang Council Luar Biasa ke-32 secara virtual pada Selasa (26/5/2020).

Sesi diskusi informal ini merupakan yang pertama dari tiga sesi diskusi informal yang telah disepakati untuk digelar guna memfasilitasi pertukaran pandangan yang lebih baik terkait penyelenggaraan Sidang Dewan IMO Luar Biasa ke-32 yang disepakati akan digelar melalui korespondensi mulai dari 4 Mei - 17 Juli 2020.

Arif menjelaskan, melalui diskusi ini para delegasi dapat melakukan pertukaran pandangan secara informal untuk memfasilitasi pencapaian konsensus untuk semua item

agenda Sidang Dewan IMO Luar Biasa ke-32. Adapun untuk sesi pertama diskusi informal secara virtual ini item agenda yang akan dibahas adalah item Agenda 1 s.d 4, yakni Adopsi Agenda, Pengabaian Aturan dan Prosedur atau Rules and Procedures (ROP), Prioritas dan Rekonstruksi Jadwal Pertemuan IMO, serta Proposal untuk Memfasilitasi Kegiatan Pelayaran Selama Pandemi Covid-19.

“Kami telah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap agenda kedua, yakni Pengabaian Aturan dan Prosedur, dan agar Dewan mengaktifkan Aturan 55 dari ROP-nya, serta mengesampingkan Aturan 2, 3, 14 dan 25 untuk keperluan sesi luar biasa selama keadaan luar biasa ini,” ujarnya.

Aturan 55 dalam ROP Dewan IMO menetapkan, bahwa Aturan dan Prosedur dapat ditangguhkan oleh keputusan Dewan yang diambil oleh mayoritas Anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tentang proposal penangguhan tersebut telah diberikan dua puluh empat jam sebelumnya. Pemberitahuan ini dapat dicabut jika tidak ada anggota yang keberatan.

Arif menuturkan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Proposal Uni Emirat Arab untuk memeriksa apakah ada beberapa Aturan dalam ROP Komite IMO yang perlu dihapuskan, terutama terkait pemilihan Ketua dan Wakil Ketua untuk Komite-Komite Teknis di bawah IMO tahun 2021.

“Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komite-Komite Teknis di bawah IMO Tahun 2021 ini menurut kami ada dua kemungkinan, yakni menyesuaikan aturan teknis pemilihan bagi negara-negara Anggota atau menangguhkan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua,” terangnya.

Sedangkan terkait Agenda Item 4 tentang Fasilitas Kegiatan Pelayaran selama Pandemi Covid-19, Indonesia menurut Arif, memiliki pandangan yang sama dengan Anggota Dewan lainnya, bahwa selama pandemi COVID-19 ini, negara-negara harus memastikan lalu lintas laut dapat berjalan dengan lancar, khususnya terkait rantai pasokan global yang membawa komponen medis yang diperlukan dalam perang melawan pandemi.

“Selain itu, kita sampaikan juga komitmen dan prioritas Indonesia terhadap perlindungan bagi Pelaut yang bekerja di atas kapal,” imbuhnya.

Dikatakan Arif, Kementerian Perhubungan telah menyampaikan tentang pentingnya upaya lebih dari negara-negara anggota dan perusahaan pelayaran untuk memastikan percepatan proses repatriasi pelaut, dengan tetap

memperhatikan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 serta Surat Edaran IMO No. 4204/Add.14 tentang Coronavirus (Covid-19) – Protokol Kerangka Kerja yang Direkomendasikan untuk Memastikan Pergantian dan Perjalanan Awak Kapal yang Aman Selama Pandemi Coronavirus (Covid-19).

Menurut Arif, Sekretaris Jenderal IMO menempatkan penekanan khusus pada peran pelaut dalam perang global melawan Pandemi dengan membentuk Tim Aksi Krisis Pelaut (SCAT) di dalam Sekretariat IMO untuk turut serta dalam kasus-kasus khusus mengenai pergantian awak, repatriasi, akses ke perawatan medis dan/atau penelantaran, dimana resolusi di tingkat PBB/diplomatik diperlukan.

Sekretariat IMO sangat aktif bekerja sama dengan badan-badan dan badan-badan PBB lainnya dalam mengatasi pandemi. Khususnya WHO, ILO, ICAO, WCO, IOM dan UNGC. Selain itu, Sekretariat juga secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan mingguan Kelompok Strategi Korona yang dipimpin ICS, yang terdiri dari sejumlah besar industri dan asosiasi perkapalan, serta IMO, WHO dan ILO.

Untuk itu, tambah Arif, Indonesia menyampaikan penghargaan terhadap inisiatif yang diambil oleh Sekretariat IMO dalam menangani dampak pandemi terhadap pelaut, salah satunya dengan pembentukan SCAT, yang berfungsi sebagai platform koordinasi untuk semua pemangku kepentingan terkait maritim dalam menangani masalah-masalah seperti kesejahteraan awak, fasilitasi pergantian awak kapal, panduan tentang penggunaan APD, serta penelantaran pelaut.

“Adapun terkait permasalahan repatriasi Pelaut, per tanggal 22 Mei 2020, Indonesia telah memfasilitasi proses repatriasi sebanyak 2.317 orang Warga Negara Indonesia (WNI), baik itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun dan Anak Buah Kapal (ABK) dari 12 kapal pesiar asing untuk Kembali ke Indonesia melalui jalur laut,” pungkasnya. (*)

INDONESIA MASUK GREY LIST TOKYO MOU

Setelah menunjukkan catatan yang baik selama 2019 dalam hal memastikan kapal-kapal Indonesia yang berlayar keluar negeri telah memenuhi aspek kelaiklautan kapal yang diatur dalam persyaratan Tokyo MOU, kini Indonesia berada di posisi Grey List Tokyo MOU yang sebelumnya berada di posisi Black List.

Hal tersebut berdasarkan hasil Laporan Tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 yang dikeluarkan oleh Tokyo MOU yang menyebutkan bahwa saat ini posisi Indonesia sudah keluar dari Black List dan menempati posisi Grey List dan selanjutnya, Indonesia bersiap menuju White List di Tokyo MOU.

“Hasil laporan tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 ini merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal kapal niaga yang dilakukan oleh negara negara Anggota Tokyo MOU dimana terdapat 21 negara full member atau negara keanggotaan penuh,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, (14/5/2020).

Menurut Ahmad, keluarnya posisi Indonesia dari blacklist Tokyo MOU akan memberikan dampak yang sangat positif dan memberikan kepercayaan bagi pemilik muatan sehingga kapal kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya untuk membawa muatannya ke manca negara.

Ahmad mengatakan, keberhasilan Indonesia keluar dari black List ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dimana salah satunya pada 2018 melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor. UM.003/11/8 DJPL-18 mewajibkan agar seluruh kapal berbendera Indonesia yang akan keluar negeri harus diperiksa secara ketat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal bersama dengan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO).

“Surat Edaran Dirjen Hubla ini memberikan legalitas kepada para Pengawas Kapal asing (PSCO) untuk lebih ketat lagi dalam memberikan pengawasan terhadap kapal kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar keluar negeri,”ujarnya.

Ahmad mencontohkan, salah satu Pelabuhan yang melaksanakan surat edaran tersebut adalah Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dimana setiap kapal Indonesia yang akan keluar negeri mendapat pemeriksaan yang cukup ketat. Bagi kapal-kapal yang dari hasil pemeriksaan oleh PSCO ditemukan kekurangan yang beresiko kapal akan detained atau ditahan dan tidak diperbolehkan diberangkatkan serta tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Pemeriksaan yang sangat ketat inilah yang sekarang membawa dampak yang positif bagi pelayaran di Indonesia, dengan di masukannya Indonesia kedalam Grey List yang selanjutnya dengan upaya upaya yang lebih keras lagi kita harapkan dapat masuk kepada White List untuk tahun mendatang,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan menilai partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Tokyo MoU memberikan sejumlah benefit dalam menjaga standard keamanan dan keselamatan kapal.



Adapun hasil pemeriksaan Port State Control (PSC) dibawah naungan Tokyo MoU diakui secara internasional. Keanggotaan Indonesia di Tokyo MoU juga membuat pelabuhan di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing.

Selain itu, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjamin kelaiklautan kapal Berbendera Indonesia ditunjukkan pula dengan membentuk Lembaga yang diberi nama Ship Safety Inspection - Center of excellence atau Pusat Unggulan Pemeriksaan Keselamatan Kapal, dimana tujuan utama dari Lembaga ini adalah untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam mencetak para Pemeriksa Keselamatan Kapal baik Marine Inspector maupun Port State Control Officer untuk melaksanakan pemeriksaan kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing sehingga mempunyai kemampuan setara dengan standar pemeriksaan keselamatan kapal kelas dunia.

Ke depan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap agar keluarnya Indonesia dari Black List Tokyo MOU ini bisa memberikan dampak yang sangat positif sehingga kapal kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya oleh pemilik muatan untuk membawa muatannya ke luar negeri.

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari 21 negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. (*)

INI STRATEGI TOL LAUT HADAPI NEW NORMAL

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan arus pengiriman barang dalam program Tol Laut tetap berjalan dengan protokol new normal. Dalam protokol new normal telah dipersiapkan sejumlah mekanisme yang diharapkan dapat memperlancar proses pengiriman barang melalui jalur laut dengan mengoptimalkan Tol Laut.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Wisnu Handoko mengatakan, di masa new normal ini pihaknya tetap mendistribusikan logistik dan mencoba menggerakkan perekonomian rakyat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.



“Roda ekonomi harus bergerak dan perusahaan tetap bisa menjalankan bisnisnya sehingga pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut,” kata Capt. Wisnu seperti dikutip hubla.dephub.go.id, Sabtu (6/6/2020).

Dijelaskan Capt. Wisnu, salah satu strategi yang akan diterapkan adalah dengan mengoptimalkan Logistic Communication System (LCS). Selain itu, data muatan dengan LCS akan lebih diperketat sehingga akan menghilangkan penyimpangan SOP penyelenggaraan program Tol Laut.

“Oleh karena itu, implementasi pelaksanaan SOP pengiriman barang akan diperketat dengan registrasi sesuai KTP dan NPWP,” jelasnya.

LCS yang dikembangkan BUMN Telkom diharapkan mampu membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest dan biaya pengiriman, data statistik pengiriman muatan berangkat dan balik, sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting).

Pada informasi muatan dan ruang kapal ini, sambung Capt. Wisnu, Ditjen Hubla akan memfasilitasi proses bisnis pemesanan, pengiriman kontainer, transparansi standarisasi biaya logistik dan disparitas harga bapokting. “Peran LCS tidak hanya menghilangkan kontak fisik, tetapi juga bisa merangsang

persaingan sehat karena pelaku usaha bakal saling memantau harga yang diterapkan masing-masing. Para pelaku bisnis wajib mengunggah biaya jasa mereka masing-masing,” tuturnya.

Kemenhub berharap agar Tol Laut Logistik di masa new normal bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha perdagangan bapokting antar pulau untuk semakin meningkatkan volume pengiriman barang dalam memenuhi kebutuhan daerah.

“Kami sangat apresiasi beberapa kepala daerah sudah membuktikan komitmennya untuk mengirim muatan balik produksi daerah seperti Morotai, Bitung, Tahuna, Saumlaki, bahkan ada yang sampai mengirimkan muatan baliknya hingga 54 Teus, di mana mayoritas muatan berisi ikan, kayu, kopra, dan lainnya,” terang Capt. Wisnu.

Senada dengan komitmen Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk memanfaatkan kapal-kapal Tol Laut guna menjaga pasokan logistik nasional.

“Baik Bulog maupun Kemendag memastikan akan melakukan pengiriman beras, gula, minyak goreng, tepung dan bapokting lainnya ke berbagai pelosok nusantara dengan memanfaatkan kapal-kapal Tol Laut,” imbuhnya.

Adapun selama masa Pandemi Covid-19, kapal barang dan kapal angkutan laut khusus tetap diizinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan protokol kesehatan penanganan Covid-19 dan kriteria pembatasan perjalanan orang yang pelaksanaannya akan diawasi secara lebih ketat. (*)

MENGENAL E-PILOTAGE PADA ALUR PELAYARAN



Kementerian Perhubungan berencana menerapkan Electronic Pilotage (E-Pilotage) di perairan Indonesia dan akan dilakukan uji coba (test bed) terlebih dahulu di empat stasiun Vessel Traffic Services (VTS), yaitu VTS Batam, VTS Tanjung Priok, VTS Benoa dan VTS Tarakan.

Lalu, apa sih yang dimaksud dengan E-Pilotage? Bagi sahabat INSA yang ingin mengetahui apa itu E-Pilotage, Praktisi Maritim Capt. Zaenal A. Hasibuan akan berbagi ilmu mengenai E-Pilotage pada alur pelayaran. Yuk kita simak!

APA ITU E-PILOTAGE?

Alur pelayaran di dunia dan tata cara bernavigasi di laut diatur oleh IMO lewat STCW, SOLAS, Collision Regulation (Colregs 1972) dan IALA (buoyage system) untuk memenuhi aspek keselamatan pelayaran.

Pada area umum dimana kapal bebas bernavigasi, dunia pelayaran dilengkapi dengan peta laut, data kedalaman, jenis dasar laut, instalasi bawah laut dan tanda-tanda navigasi lainnya. Di daerah tertentu dipasang Sarana *Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)* untuk memudahkan navigator mendapat referensi baringan benda darat *(Ilmu Pelayaran Datar)*.

Area yang sensitive dan ramai yang dianggap memerlukan tambahan data dan sarana, dilengkapi lagi dengan *Traffic Separation Scheme (TSS)* seperti di Selat Dover, Selat Singapura, dan di Indonesia ada di Selat Sunda dan Selat Lombok. Daerah ini tidak hanya

secara permanen ditampilkan di peta, tetapi secara aktif negara pengelola TSS juga memonitor setiap pergerakan kapal secara live 24 jam sehari tanpa henti minimal dengan perangkat Radar, Radio, AIS, dan Guard vessel untuk melakukan intervensi langsung jika dibutuhkan.

Beberapa kapal, secara voluntary atau mandatory sesuai ukuran dan jenis kapal akan mengambil jasa Pilot untuk melewati area tersebut. Sudah pasti daerah ini dilengkapi pula oleh SBNP yang lebih spesifik karakteristiknya sebagai syarat tercapainya Safe Navigation.

Kehadiran Pilot/pandu di atas kapal sudah terjadi ratusan tahun lalu, dan hampir semua memiliki basic sama: pandu/pilot memiliki pengetahuan tentang keadaan perairan/ pelabuhan setempat dengan sangat baik disamping pengetahuan bernavigasi, dan bermanuver di perairan sempit dan dangkal.

Selanjutnya pada area pelayaran di sebuah pelabuhan yang ramai, pengelola juga melengkapi daerahnya dengan *Vessel Traffic System (VTS)*, fungsi dan kegunaannya kurang lebih sama dengan TSS hanya saja ini lebih spesifik mengarah ke sebuah pelabuhan tertentu. Misalnya Maas Approach di Rotterdam, German Bight Traffic menuju Sungai Elbe di Jerman, atau Wandelaar menuju Antwerpen di Belgia atau beberapa pelabuhan di Indonesia.

Kehadiran Pilot/ Pandu di area VTS sebagian besar bersifat Mandatori termasuk di Indonesia, seperti Karang Jombang menuju Surabaya/Gresik. Tentu selama bernavigasi di area tersebut, pandu yang sangat fasih wilayah pelayaran juga dibantu oleh VTS lewat controllernya. Tugas VTS controller memberikan informasi akurat

dan update tentang lalu lintas pelayaran, adanya bahaya baru alur atau mengingatkan kapal tentang adanya kegiatan khusus di alur tersebut.

Walaupun pada area Mandatory Pilotage, pengelola biasanya memberikan *pengecualian* terhadap kapal-kapal yang regular mengunjungi daerah tersebut. Atau kapal lain yang secara ukuran ada dibawah GT dari wajib pandu.

Area seperti Maas Approach, Wandelaar, atau German Bight boleh dilayari oleh kapal Ferry, dan kapal yang memiliki Nakhoda/Navigator yang memiliki pengetahuan lokal sama baiknya dengan pilot/pandu lokal. Biasanya selain jumlah visit minimum dalam setahun, mereka juga diuji oleh pejabat setempat untuk mendapatkan Pilot exemption Certificate, *tentu kapal tidak harus membayar biaya pilot jika melakukannya sendiri*.

Lalu apakah E-Pilotage berarti peran Pilot akan digantikan oleh VTS controller? Jawabnya adalah *TIDAK BISA*. Selain perbedaan nyata peran dan kualifikasi Pilot dengan VTS controller, harus diingat bahwa ketika pandu memberikan advice, maka akan langsung didengar oleh navigator dan dilaksanakan.

Sementara komunikasi antara VTS Controller dan kapal bergantung pada radio VHF yang bisa terinterupsi oleh pengguna lain, keadaan cuaca, perbedaan bahasa, dan banyak hal lain. Tentu payung hukum dan contoh implementasi

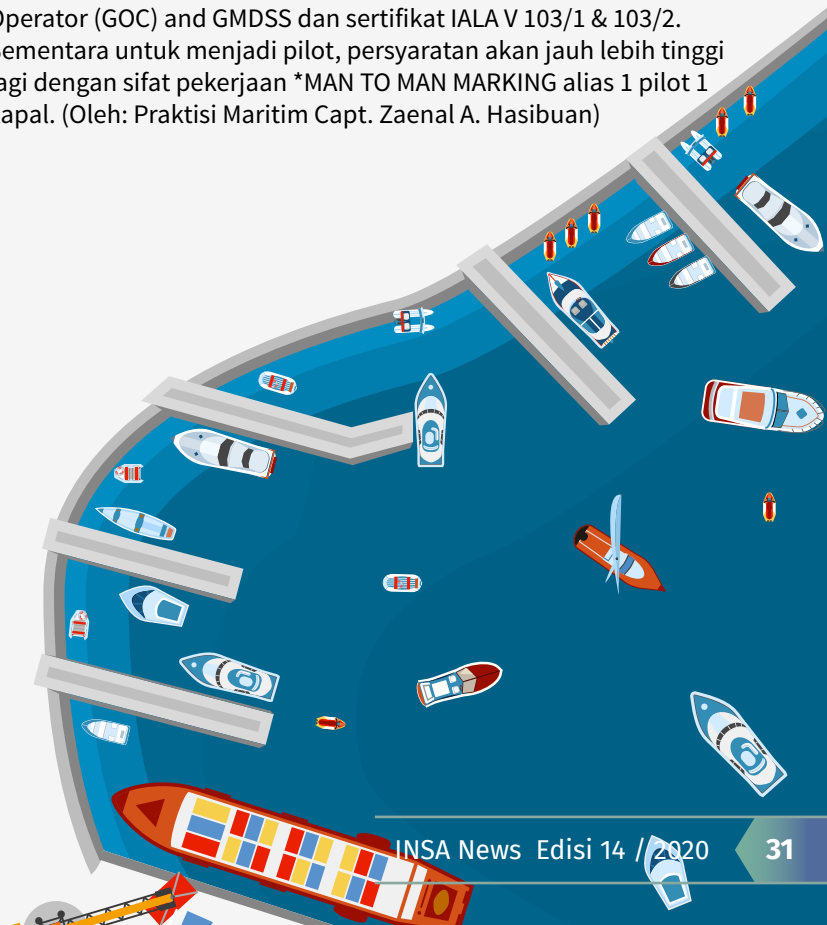
di negara yang lebih maju dalam dunia pelayaran juga harus dijadikan acuan, yang sejauh ini belum ada kecuali kapal yang benar-benar Autonomous.

Kegiatan pemanduan (pilotage) adalah dimana SEORANG pilot memberi advice kepada SEORANG navigator, bukan kepada kapalnya. IMO sendiri men-formalkan kegiatan dan tugas pilot di tahun 1968, dengan resolusi nomor A.159(ES.IV) dan dituangkan dalam Chapter V SOLAS (A.426(XI)), serta aturan-aturan lain yang terus dikembangkan.

Sementara untuk VTS, IMO memasukkannya kedalam resolusi A.578 (14) Guidelines for Vessel Traffic Services, setelah sebelumnya pada 1968 IMO membuat resolusi A.158 (ES.IV) soal VTS, yang juga kemudian di adopsi kedalam SOLAS Chapter V, aturan 12 soal VTS.

Di Indonesia, selain pemerintah yang bertindak sebagai pengelola VTS, swasta (Oil Company) pun sudah beberapa yang memiliki VTS demi sebuah kepentingan yang sama: *Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim serta Perlindungan asset milik pengelola*. Bahwa pada akhirnya kegiatan Pilotage berbayar, itu adalah konsekuensi dan bukan tujuan.

Untuk menjadi VTS controller yang baik, maka dibutuhkan persyaratan umum seperti; Minimum Deck Officer ANT III (COC), pengalaman sebagai navigator di atas kapal, memiliki sertifikat ECDIS and RADAR/ ARPA, memiliki sertifikat General Radio Operator (GOC) and GMDSS dan sertifikat IALA V 103/1 & 103/2. Sementara untuk menjadi pilot, persyaratan akan jauh lebih tinggi lagi dengan sifat pekerjaan *MAN TO MAN MARKING alias 1 pilot 1 kapal. (Oleh: Praktisi Maritim Capt. Zaenal A. Hasibuan)





SKENARIO OPERATOR PELABUHAN SAMBUT NEW NORMAL

Badan Usaha Pelabuhan (BUP) plat merah, PT Pelindo I - IV menyiapkan skenario menghadapi new normal di lingkungan kerja masing-masing pelabuhan. Skenario yang disiapkan mulai dari penerapan digitalisasi hingga memperketat protokol kesehatan.

Hal ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal BUMN.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I dalam menghadapi new normal akan mengoptimalkan layanan online serta menerapkan digitalisasi dalam sistem pelayanan jasa kepelabuhanan guna memudahkan penggunaan jasa di masa pandemi Covid-19. Direktur SDM Pelindo I M.

Hamied Wijaya mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, perusahaan telah melakukan layanan operasional logistik 24/7 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sejak kapal akan bersandar di pelabuhan.

“Layanan digital ini sudah kita terapkan di seluruh lingkungan Pelindo I yang didesain khusus bagi para pengguna jasa yang dapat diakses secara mudah, aman, dan di mana saja,” ujar Hamied dalam keterangan resminya, Rabu (03/06/2020).

Hamid bilang, Pelindo I juga telah menerapkan sistem e-berthing di Pelabuhan Tanjung Pinang yang digunakan untuk permintaan pelayanan tambatan kapal secara online yang diajukan oleh perusahaan pelayaran.

“Kami akan mengoptimalkan layanan tersebut saat penerapan skenario the new normal agar layanan kepelabuhanan tetap berjalan dengan lancar,” sebutnya.

Perusahaan terus mengoptimalkan aspek teknologi pada era new normal. Seperti mengoptimalkan media web portal iProcura untuk berinteraksi kepada para penyedia barang dan jasa. “Dengan the new normal ini diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi nasional dan mendukung program-program strategis pemerintah,” bebarnya.

Beralih ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC, perseroan telah menyiapkan skenario new normal yang merupakan kelanjutan dari penerapan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di lingkungan kerja dan operasional IPC.

“Prosedur antisipasi penyebaran virus Corona di pelabuhan tersebut akan dijadikan acuan standar operasional baru,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono seperti dikutip laman indonesiaport.co.id.

Arif menyebutkan sejak awal penyebaran Covid-19, IPC langsung memberlakukan prosedur tambahan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seluruh karyawan serta semua stakeholder terkait. Kewajiban menggunakan alat perlindungan diri (APD) yang biasa diterapkan, ditambah dengan kewajiban mengenakan

masker dan sarung tangan. Langkah ini harus diambil, karena layanan kepelabuhanan terus berjalan di tengah pandemi.

“Ketika wabah merebak, IPC menerapkan prosedur tambahan berupa kewajiban menggunakan masker dan sarung tangan,” tuturnya.

Dikatakan Arif, IPC juga menerapkan protokol social distancing dan physical distancing, penyediaan sarana kesehatan, alat pendeteksi suhu tubuh, penyemprotan disinfektan di ruang kerja, prosedur kunjungan tamu, hingga kebijakan tugas dinas karyawan. Kebijakan work from home (WFH) juga diberlakukan dan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan kondisi dan arahan pemerintah.

Kini, sambung Arif, IPC sedang menyusun timeline pelaksanaan skenario new normal terkait keamanan dan kesehatan, baik untuk pekerja, mitra komersial, dan seluruh pemangku kepentingan pelabuhan dengan mengacu pada arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di wilayah kerja Perseroan. IPC juga memastikan bahwa layanan pelabuhan terus berjalan dengan baik di seluruh lini pelabuhan.

“Untuk memastikan operasional tetap berjalan, IPC menyiapkan pengaturan deployment yang

efektif di seluruh Terminal, sehingga setiap kapal dapat terlayani sesuai dengan jadwal kedatangannya tanpa terganggu adanya pembatasan aktivitas masyarakat dengan tetap menjalankan protokol Covid-19,” tuturnya. Hal yang sama juga dilakukan PT Pelindo III, perseroan mempersiapkan skema antisipasi skenario the new normal mulai dari penerapan protokol kesehatan, penerapan WFH hingga penerapan layanan digital untuk kegiatan operasionalnya.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung mengatakan, selama pandemi Covid-19 dan PSBB, pelayanan jasa kepelabuhanan tetap beroperasi 24/7 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Khusus pelayanan kapal internasional, sebelum sandar menjalani pemeriksaan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Kapal hanya diizinkan untuk bersandar apabila sudah dinyatakan bersih dan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang maupun penumpang.

Dijelaskan Doso, Pelindo III menerapkan sistem pelayanan kepelabuhanan berbasis internet, Port Operation Command Center atau (POCC). Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan kepelabuhanan dengan mengatur seluruh aktivitas kepelabuhanan baik bongkar muat maupun jadwal sandar kapal di pelabuhan demi kenyamanan para mitra bisnis seiring semakin meningkatnya aktivitas kapal dan bongkar muat barang di sejumlah pelabuhan yang dikelolanya.

Selama ini, lanjut Doso, Pelindo III telah menerapkan pelayanan dan operasional berbasis digital melalui berbagai sistem dan aplikasi, di antaranya single portal Integrated Billing System (IBS) yang memiliki layanan e-registrasi, e-booking, e-tracking, e-payment, e-invoice, e-billing, dan e-care.

Selain itu juga ada meeting tambatan online yang memudahkan perusahaan pelayaran dan agen kapal rapat dari kantornya masing-masing dan juga melalui aplikasi tambatan buatan Pelindo III, “magic berthing” dimana pelayaran bisa koordinasi untuk merencanakan tambatan dan berkomunikasi langsung dengan petugas tambatan pelindo III dan Otoritas Pelabuhan untuk penetapan tambatan. Terbaru, saat ini sedang dilakukan uji coba Epilot di pelabuhan Tanjung Perak, diharapkan sukses, sehingga nantinya kapal dapat masuk ke pelabuhan dengan bantuan sistem digital.

Doso mengungkapkan semua layanan tersebut merupakan sebuah web portal elektronik yang didesain khusus bagi para pelanggan dan dapat diakses secara daring secara aman serta mudah, untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan Pelindo 3 dalam bertransaksi.

“Para pengguna jasa dapat menggunakan layanan daring dari Pelindo 3, sehingga tidak perlu datang ke terminal/pelabuhan untuk mendapatkan layanan jasa kepelabuhanan dari Pelindo III,” kata Doso dalam keterangan resminya.

Selain itu, selama masa pandemi covid-19 Pelindo III secara rutin setiap hari melakukan pendataan kondisi kesehatan karyawannya bagi yang bekerja dari rumah atau yang bekerja dari kantor melalui aplikasi absensi karyawan secara daring yang sudah digunakan selama ini.

“Sebagai langkah awal, kami sudah membentuk *task force* untuk menyusun skenario new normal serta mengawasi pelaksanaannya di lapangan,” imbuhnya.

Senada dengan Pelindo I-III, PT Pelindo IV juga telah menyiapkan skenario new normal di lingkungan kantor maupun lapangan.

Direktur SDM Pelindo IV M. Asyhari mengatakan, skenario New Normal akan diberlakukan secara bertahap dan dilaksanakan secara efektif, serta berlaku menyeluruh di lingkungan PT Pelindo IV pada pertengahan Juli 2020, namun pemberlakuannya tetap berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 dan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah di masing-masing cabang.

“Untuk optimalisasi dan efektivitasnya, maka manajemen perlu untuk melakukan beberapa langkah persiapan. Di antaranya melaksanakan protokol penerapan proses bisnis untuk pelayanan jasa kepelabuhanan yakni pelayanan kapal, barang, petikemas dan penumpang,” tutur Asyhari.

Dijelaskan Asyhari, saat ini perusahaan sudah melakukan perubahan pola kerja yang dimulai dengan Tahap 1 yaitu pada 25 hingga 30 Mei 2020. Dimana pada Tahap 1 ini, program Work From Home (WFH) hanya diberlakukan kepada pegawai yang berusia 46 tahun atau lebih.

“Dan program Work From Office (WFO) berlaku bagi pegawai yang berusia 45 tahun kebawah, kecuali yang oleh karena alasan tertentu tidak memungkinkan,” jelasnya.

Kemudian di Tahap 2 yang berlaku pada 1 hingga 5 Juni 2020, program WFH hanya untuk pegawai yang berusia 46 tahun atau lebih dengan komposisi 50% WFH dan 50% WFO. Serta program WFO berlaku bagi pegawai yang berusia 45 tahun kebawah.

Tahap 3 yang akan diberlakukan pada 8 sampai dengan 26 Juni 2020, program WFH hanya untuk pegawai yang berusia 46 tahun atau lebih dengan komposisi 40% WFH dan 60% WFO. “Di Tahap 4 nanti yang akan diberlakukan pada 29 Juni sampai dengan 10 Juli 2020, program WFH hanya untuk pegawai yang berusia 46 tahun atau lebih dan dengan perubahan komposisi yakni 20% WFH dan 80% WFO,” urai Asyhari.

Lalu, Tahap 5 yang akan berlaku pada 13 Juli 2020 dan seterusnya, program WFH tidak diberlakukan lagi. Seluruh pegawai sudah bekerja normal seperti biasa, kecuali ada pertimbangan tertentu terkait kondisi kesehatan, masa penyembuhan atau pegawai yang sedang dalam kondisi hamil. (*)

MENPERIN USULKAN PENGGUNAAN LSF DITUNDA

Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Perhubungan menunda pemberlakuan penggunaan bahan bakar bersulfur rendah (Low Sulphur Fuel/LSF) pada angkutan laut yang beroperasi di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Sebab, Covid-19 menyebabkan ekonomi nasional melambat dan juga memengaruhi tingkat daya saing industri nasional ikut tertekan serta mengancam keberlangsungan hidup industri nasional.

Hal ini tertuang dalam surat Menteri Perindustrian nomor: B/416/M-IND/IND/V/2020 tentang Penundaan Kebijakan Low Sulphur Fuel (LSF), tertanggal 27 Mei 2020.

Dalam suratnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, salah satu faktor yang cukup signifikan memengaruhi daya saing industri adalah biaya energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan pada proses produksi maupun pendukungnya. BBM juga memiliki kontribusi signifikan pada besarnya biaya logistik bahan baku maupun barang jadi industri. Penggunaan LSF dengan harga

yang jauh lebih mahal daripada penggunaan High Sulphur Fuel (HSF) untuk kapal laut berdampak pada meningkatnya biaya logistik secara signifikan sehingga daya saing industri semakin menurun.

Karena kondisi itu, diharapkan Menteri Perhubungan dapat mempertimbangkan penundaan kebijakan penggunaan LSF untuk kapal Indonesia yang berlayar secara domestik/lokal. Hal ini agar biaya logistik nasional menjadi semakin kompetitif dalam mendistribusikan barang/produk khususnya antarpulau di Indonesia.

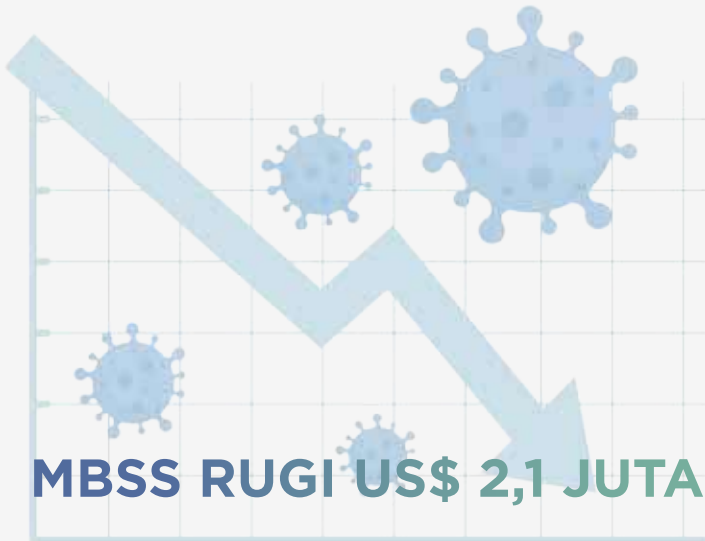
“Dengan adanya penundaan kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian mengharapkan kinerja logistik antarpulau di Indonesia menjadi lebih kompetitif sehingga industri dapat meningkatkan daya saing dan mempertahankan kelangsungan usahanya,” tulis Agus dalam suratnya.

Selain itu, Agus juga menyurati PT Pertamina (Persero) agar harga BBM Subsidi dan Industri diturunkan guna meningkatkan daya saing industri nasional di tengah pandemi Covid-19. Sama seperti LSF, bahwa BBM bersubsidi dan industri merupakan sumber energi yang digunakan oleh banyak industri dalam mendukung proses produksi maupun kegiatan lainnya.

“Meningkat harga minyak dunia saat ini telah turun cukup banyak dari harga semula, maka kami mohon kiranya Saudara (Direktur Utama Pertamina-red) dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga BBM bersubsidi dan BBM industri,” kata Agus dalam suratnya kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero). (*)



Q1 2020



Pandemi Covid-19 menyebabkan kinerja keuangan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) pada kuartal 1-2020 tergerus. Perseroan mencatat kerugian di kuartal 1-2020 mencapai US\$ 2,1 juta dan pendapatan menurun 21,61% dari US\$ 20,88 juta di kuartal 1-2019 menjadi US\$ 16,37 juta di kuartal 1-2020.

Pada kuartal 1-2019, emiten yang bergerak di sektor transportasi laut ini memperoleh laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US\$ 1,50 juta. Adapun laba kotor perusahaan menurun cukup dalam 62,49% menjadi hanya US\$ 1,61 juta dari perolehan US\$ 4,31 juta.

Kemudian perolehan total aset dan ekuitas merosot masing-masing 1,56% dan 1,29% secara year to date. Total aset MBSS berada di angka US\$ 214,71 juta dari US\$ 218,13 juta di akhir 2019. Sementara total ekuitas senilai US\$ 169,71 juta dari US\$ 171,88 juta.

Sementara itu, liabilitas turun 2,58% dari US\$ 46,25 juta di kuartal I-2019 menjadi US\$ 45,06 juta pada kuartal 1-2020.

Direktur PT MBSS Burhan Sutanto mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 memengaruhi utilitas atau penggunaan operasional sejumlah kapalnya sebesar 89%. Karena itu, perusahaan berhati-hati menambah lagi aset kapalnya dan lebih melihat perkembangan pasar terlebih dulu sebelum memutuskan menambah lagi jumlah kapalnya.

Burhan menuturkan kapal-kapal perusahaan masih fokus pada pengangkutan batubara. Namun, perusahaan masih mencari peluang yang tersedia sesuai dengan kondisi pasar.

“Jenis pengangkutan MBSS saat ini masih fokus dengan batubara, namun dengan tetap menerapkan strategi untuk mencari opportunity yang tersedia dan kondisi pasar,” kata Burhan seperti dikutip kontan.co.id, Jumat (05/06/2020).

Seperti diketahui, MBSS memiliki 78 tugboat, 62 barge, 6 floating crane, dan 1 support vessel. (*)



14 JUNI, TARIF TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA MULAI BERLAKU

PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) akan mengenakan tarif jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) mulai Minggu, 14 Juni 2020, pukul 00.00 WITA. Direktur Utama PT JBS S.T.H Saragi mengatakan, ruas Samboja hingga Simpang Jembatan Mahkota 2 telah dioperasikan tanpa tarif tol sejak Kamis, 19 Desember 2019 pukul 06.00 WITA.

“Ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) dioperasikan tanpa tarif untuk memberikan sosialisasi yang lebih optimal kepada masyarakat hingga tarif tol resmi diberlakukan,” ujar Saragi dalam keterangan resminya, Kamis (04/06/2020).

Saragi menyebutkan besaran tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 534/KPTS/M/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2).

Saragih mengungkapkan sebelumnya untuk perjalanan menuju Samboja hingga Simpang Jembatan Mahkota 2 (Samarinda) membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam, kini dengan terhubungnya Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2-4 (Samboja-Jembatan Mahkota 2) sepanjang 64,87 km ini akan memotong waktu perjalanan menjadi hanya 1-1,5 jam.

Secara keseluruhan, Jalan Tol Balikpapan Samarinda memiliki total panjang 97,99 Km yang dibagi menjadi lima seksi, yaitu Seksi V ruas Sepinggang (11,09 Km) - Balikpapan (Km 13), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) - Samboja (22,03 Km), Seksi II ruas Samboja - Muara Jawa (30,98 Km), Seksi III Muara Jawa - Palaran (17,30 Km) dan Seksi IV Palaran - Samarinda (16,59 Km).

Saragih menghimbau kepada pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mentaati rambu-rambu, serta memantau kondisi lalu lintas perjalanan. Pengguna jalan tol dapat menghubungi Contact Service 14080 untuk wilayah nasional dan 08115990800 untuk wilayah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Berikut tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 2, 3 dan 4 (Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2) :

1. Dari Samboja Menuju Simpang Pasir		2. Dari Samboja Menuju Simpang Jembatan Mahkota 2	
Golongan I	: Rp. 75.500	Golongan I	: Rp. 83.500
Golongan II	: Rp. 113.000	Golongan II	: Rp. 125.500
Golongan III	: Rp. 113.000	Golongan III	: Rp. 125.500
Golongan IV	: Rp. 151.000	Golongan IV	: Rp. 167.500
Golongan V	: Rp. 151.000	Golongan V	: Rp. 167.500
3. Dari Simpang Pasir Menuju Samboja		4. Dari Simpang Jembatan Mahkota 2 Menuju Samboja	
Golongan I	: Rp75.500	Golongan I	: Rp83.500
Golongan II	: Rp113.000	Golongan II	: Rp125.500
Golongan III	: Rp113.000	Golongan III	: Rp125.500
Golongan IV	: Rp151.000	Golongan IV	: Rp167.500
Golongan V	: Rp151.000	Golongan V	: Rp167.500



PEJABAT BAKAL KENA SANKSI JIKA PROYEK BUMN TAK PENUHI TKDN

Kementerian Perindustrian akan memberikan sanksi tegas kepada Kementerian, Lembaga, dan perusahaan-perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dalam pembangunan atau belanja negaranya tidak memanfaatkan komponen dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hal ini sudah disepakati bersama dalam rapat pembahasan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kita bisa lihat bahwa proyek-proyek yang ada di BUMN khususnya di BUMN besar, PLN, Pertamina, dan BPH Migas itu besar sekali nilai proyeknya. Dan itu akan kami awasi secara detail bagi kementerian dan lembaga, khusus BUMN-BUMN besar tadi, kalau mereka tidak melakukan belanja terhadap proyeknya dari industri dalam negeri padahal industri dalam negerinya sudah siap, itu akan ada sanksi yang sangat tegas,” kata Agus seperti dikutip Kompas.com, Kamis (28/05/2020).

“Sanksi di pejabatnya, bukan perusahaannya, akan dicopot! Itu menjadi keputusan rakortas (rapat koordinasi terbatas) yang dipimpin Pak Menko Marves,” sambungnya.

Dalam rakortas yang berlangsung sehari sebelum Lebaran ini, Agus bilang, Wakil Menteri BUMN yang hadir telah menyetujui sanksi tersebut.

“Karena secara umum, pimpinan perusahaan sudah berkomitmen tinggi terhadap TKDN, masalah biasanya ada di level bawah,” tuturnya.

Agus menjelaskan, negara membutuhkan penyerapan TKDN dari belanja kementerian dan lembaga serta proyek-proyek BUMN. Sebab, penyerapan TKDN merupakan bagian dari peningkatan permintaan, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Jadi sudah diputuskan rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marves dalam rapat TKDN itu sehari sebelum Lebaran. Bahkan, kami sudah menuliskan surat kepada BPKP, kami minta BPKP untuk melakukan audit terhadap kementerian, lembaga, dan BUMN, yang masih belum melakukan compliance terhadap kewajiban TKDN,” pungkasnya. (*)

TETAP SEHAT DAN FIT DI TENGAH PANDEMI COVID-19



Pola hidup sehat dan menjaga kondisi tubuh tetap fit perlu dijaga dan ditingkatkan di masa pandemi Covid-19. Kondisi imun yang melemah akan berdampak negatif bagi tubuh dan berpotensi terinfeksi oleh virus. Meski saat ini kegiatan bekerja dan lainnya lebih banyak dilakukan di rumah, bukan berarti abai terhadap kesehatan.

Berbagai cara dapat dilakukan agar tubuh tetap sehat dan fit selama di rumah. Ungkapan latin mengatakan “mens sana di corpore sano” yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Karena itu, kapanpun dan dimanapun kita sempatkan diri tuk rajin berolahraga.

Pada edisi ini, majalah INSA News berkesempatan mewawancarai Country General Manager MSC Indonesia Dhany Novianto mengenai cara menjaga kondisi tetap sehat dan fit di tengah pandemi Covid-19.

Kepada INSA News Dhany bercerita semenjak adanya Covid-19 dirinya lebih banyak beraktivitas di rumah, mulai



dari melakukan kegiatan bekerja hingga berolahraga. Pria yang telah menggeluti bidang pelayaran selama kurang lebih 30 tahun ini memang gemar berolahraga.

“Yang saya lakukan agar badan tetap fit, baik dalam situasi Covid-19 ataupun tidak, saya melakukan kegiatan berolahraga setiap hari/pagi kurang lebih 40 menit, saya lakukan di rumah tanpa harus keluar rumah,” kata Dhany di Jakarta.

Dhany yang juga merupakan Anggota Bidang Angkutan Petikemas Luar Negeri DPP INSA mengatakan, kegiatan olahraga yang biasa dilakukannya adalah bersepeda statis, sit up dan angkat beban yang masing-masing dilakukan selama 15 menit, dan 25 menit. Dijelaskannya, latihan angkat beban dilakukan sebanyak 600 ratus kali angkatan yang dibagi dalam tiga sesi. Kemudian sit up sebanyak 200 kali yang dibagi empat sesi.

“Semua itu dilakukan dengan gerakan yang cepat berepetisi dengan jeda 1-2 menit,” jelasnya.

Beragam manfaat dari berolahraga. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, namun bermanfaat juga dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dan tentunya hal ini diimbangi dengan mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang.

UBAH GARASI JADI KANTOR

Walaupun bekerja dari rumah, Dhany ingin tetap produktif. Tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan menjadi hal penting baginya. Dhany pun mulai menelusuri satu per satu ruangan di rumahnya untuk dijadikan tempat bekerja.

Diluar dugaan, garasi dipilihnya sebagai tempat kerja sehari-hari selama Work From Home (WFH).

“Karena saya perlu privasi di dalam bekerja dan perlu tempat yang enak buat kerja tanpa mengganggu dan diganggu oleh orang rumah, akhirnya saya putuskan garasi saya jadikan kantor/ruang kerja ke dua saya,” tuturnya.

Menurut Dhany, bekerja di rumah lebih produktif dan lebih konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan dibandingkan di kantor serta bisa mengatur waktu lebih baik.

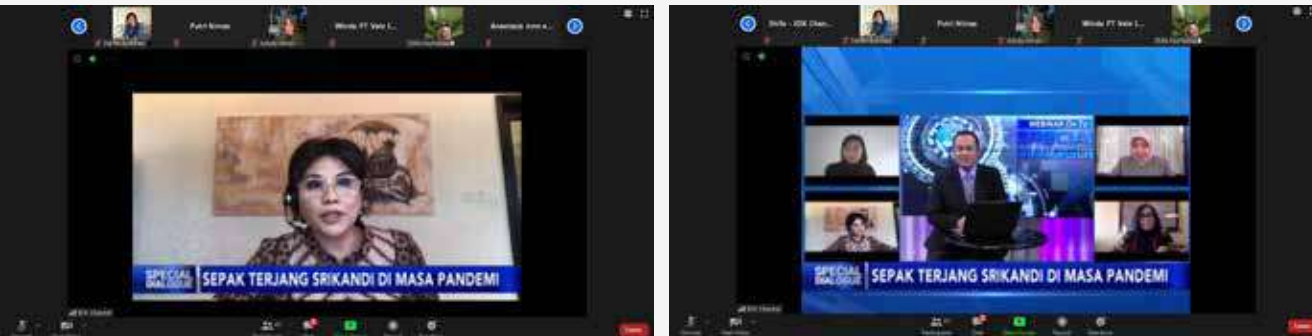
Lepas dari itu semua, Dhany merindukan akan banyak hal dan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga dapat kembali beraktivitas secara normal dan ekonomi kembali pulih.

“Yang membuat saya rindu di masa pandemi ini adalah, kegiatan bersosialisasi dengan partner bisnis, keluarga dan handai taulan, travelling juga, hangout juga dan golf,” pungkasnya. (*)



SEPUTAR INSA

DIALOG SEPAK TERJANG SRIKANDI DI MASA PANDEMI



Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi narasumber dalam acara special dialogue yang digelar IDX Channel dengan tema Sepak Terjang Srikandi di Masa Pandemi, Kamis (11/06/2020).

Carmelita mengatakan tentang dampak pandemic Covid-19 terhadap perusahaan di sektor pelayaran yang terasa merata pada hampir seluruh sektor jenis pelayaran, dan meliputi banyak aspek di perusahaan salah satunya merosotnya pendapatan perusahaan.

Lain itu, dia juga sempat menyinggung tentang kiat dan cara perusahaan pelayaran dalam beradaptasi bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Menurutnya, perusahaan pelayaran tidak banyak mengalami kesulitan dan tetap produktif selama WFH. Bahkan, saat ini WFH dirasakan lebih efisien karena bisa melakukan rapat dalam beberapa waktu yang berdekatan.

Carmelita juga mengatakan industri pelayaran harus siap memasuki new normal, apalagi industri pelayaran sebenarnya telah mulai melakukan proses digitalisasi di berbagai lini dalam beberapa waktu terakhir seiring revolusi industri 4.0. Misalnya saja, INAPORNET, DO Online yang terpadu dalam INSW dan lain sebagainya.

Acara yang digelar secara virtual ini juga menghadirkan pelaku usaha perempuan lainnya, seperti Deputy CEO PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Komisaris Utama PT Paragin Technology Nurhayati Subakat, dan Direktur Perdagangan PT Sarinah Persero Indryuwani Asikin Natanegara. (*)



Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Batam mengeluhkan buruknya tata cara pengelolaan Pelabuhan di Batam. Hal ini berdampak kepada lesunya industri maritim di Batam.

Ketua DPC INSA Batam Osman Hasyim menilai tata cara pengelolaan pelabuhan yang dikelola secara sembarangan menjadikan industri maritim Batam hancur lebur.

"Kondisi jatuhnya perekonomian dunia akibat wabah Covid-19 seperti saat ini, menyebabkan banyak kapal yang menganggur dan membutuhkan tempat untuk berlabuh dan reparasi. Sehingga posisi Batam yang strategis ini menjadi berkah bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak demikian keadaannya," kata Osman seperti dikutip postmetro.co, Senin (08/06/2020).

Osman mengungkapkan hambatan dan tantangan di Pelabuhan Batam diantaranya

PERMASALAHAN INDUSTRI PELAYARAN DI BATAM

adalah pungutan tambat di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus) termasuk di shipyard yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang tidak dipungut tarif tambat.

Lalu, sambung Osman, pungutan jasa dermaga di Pelabuhan TUKS atau Tersus, membuat aturan yang sesuka hati tanpa ada dasar hukum, memungut biaya tanpa ada pelayanan jasanya, memaksakan kewajiban kerja sama pemilik kapal tunda dengan pembagian yang sangat memberatkan sehingga pemilik kapal tunda sangat terbebani, dan menyelenggarakan pelayanan yang tidak mengacu pada Undang-Undang pelayanan publik.

Dikatakan Osman, isu-isu tersebut menjadi pembahasan DPC INSA Batam pada Dialog Publik bertema "Polemik Tarif Pelayanan Pelabuhan di Kota Batam", yang diselenggarakan Ombudsman Kepulauan Riau melalui aplikasi Zoom, Jumat (05/06/2020). Dialog tersebut dihadiri instansi terkait seperti, KSOP Batam, INSA Kota Batam, ISAA Kota Batam, dan BSOA Kota Batam. "Inti dari Dialog Publik kali ini adalah menyampaikan keluhan, hambatan dan memberikan masukan kepada Ombudsman tentang pengelolaan kepelabuhanan Batam secara sembarangan," ungkapnya.

Osman meminta kepada Ombudsman agar dapat menjalankan fungsinya yaitu

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintah Pusat maupun Daerah. Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

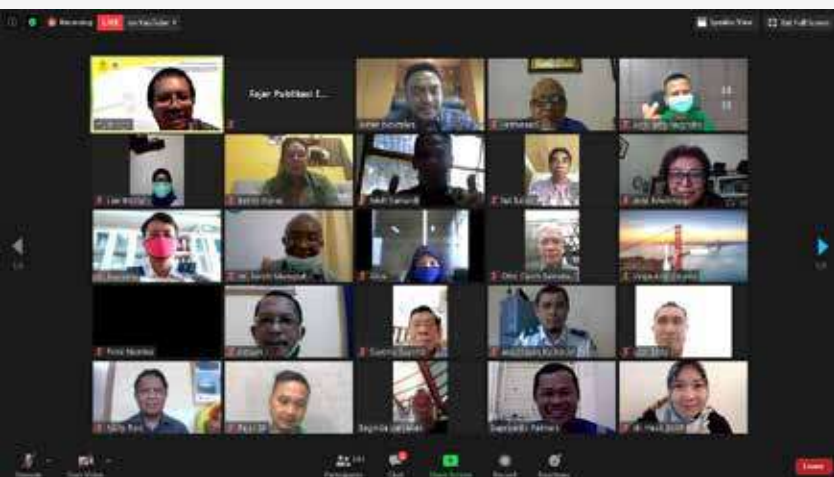
Menurut Osman, seharusnya pemerintah mendorong pertumbuhan perekonomian agar terjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, jangan malah menyulitkan dengan mengenakan beban kepada masyarakat sehingga industri maritim menjadi tidak karuan.

"Tapi yang terjadi saat ini tidaklah demikian, industri maritim kita makin meredud, banyak pemilik kapal domestik maupun internasional complain tarif yang terlalu mahal di Batam," tuturnya.

Osman berharap industri kemaritiman dapat jaya kembali serta memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada kapal-kapal untuk datang dan singgah di Batam.

"Kembalikan kejayaan maritim kita, memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada kapal-kapal untuk datang dan singgah di Batam sehingga dengan banyak kapal yang datang akan memberikan peluang bagi para pelaku usaha dan industri maritim," pungkasnya. (*)

INSA DI WEBINAR TENTANG PELAUT



Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) berpartisipasi pada Webinar dengan topik 'Perlindungan Hukum dan Protokol Kesehatan untuk Pelaut dalam Masa Pandemi Covid-19' yang diselenggarakan Myshipgo, Rabu (03/06/2020). Ketua Bidang SDM Pelaut DPP INSA Johan Novitrian menjadi narasumber pada acara webinar tersebut mewakili DPP INSA.

Dalam paparannya, Johan membahas beberapa isu seputar pelaut yang diantaranya mengenai sertifikat palsu, manning agency tidak sesuai fungsinya, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan ratifikasi MLC dalam UU No. 15/2016, overlapping regulasi, dan protokol kesehatan pelaut di masa pandemi Covid-19.

Acara webinar ini dihadiri berbagai Kementerian/Instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP). Turut hadir juga para praktisi maritim, asosiasi, DPC INSA Surabaya, DPC INSA Semarang, perusahaan pelayaran, dan akademisi.

Dari DPP INSA tampak hadir Capt. Witono Soeprapto, Sekretaris I Capt. Otto K.M Caloh, Wakil Ketua Umum V Buddy Rahkadi, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Capt. Zaenal A. Hasibuan, Wakil Ketua Bidang SDM Pelaut Lisda Y. Satria, Anggota Bidang Angkutan Cair Denny Patriot, Anggota Bidang Marketing dan Komunikasi & IT Roland Permana. (*)



PENETAPAN HUB PELABUHAN PERLU DIDUKUNG BERBAGAI ASPEK

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menghadiri Rapat Penetapan Hub Pelabuhan dan Hub Bandara di Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melalui Zoom Meeting, Selasa (02/06/2020). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ridwan Djamaluddin.

Hadir pula Wakil Menteri II Kementerian BUMN, Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman, dan perwakilan sejumlah kementerian lainnya, seperti dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyampaikan pentingnya menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang pelabuhan hub internasional yang dimaksud.



Penetapan pelabuhan hub internasional juga harus didukung adanya komoditas ekspor di daerah sekitar pelabuhan atau hinterland, yang didukung dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan kapal-kapal internasional, sehingga operator pelayaran tertarik singgah di pelabuhan tersebut.

Carmelita melanjutkan, dukungan komoditas ekspor mutlak dibutuhkan dalam penentuan pelabuhan hub internasional, mengingat dalam shipping practice dikenal prinsip ship follow the trade yakni kapal akan singgah ke suatu pelabuhan jika ada muatan perdagangan yang mencukupi secara ekonomis. Selain Carmelita, beberapa pengurus DPP INSA juga ikut hadir seperti, Trisnadi Mulia, Capt. Witono Soeprapto, Teguh Basuseto, dan Rahmat.

Lain itu, hadir pula perwakilan dari perwakilan badan usaha transportasi seperti, AP I dan II (Persero), Pelindo I-IV (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Pelni (Persero), sedangkan perwakilan asosiasi terdiri dari DPP INSA dan Indonesia National Air Carriers Association (INACA). (*)

RAPAT NEW NORMAL PENGOPERASIAN KAPAL DAN PELABUHAN



Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengikuti Rapat New Normal dalam Pengoperasian Kapal dan Pelabuhan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Jumat (29/05/2020), via Zoom Cloud Meeting.

Rapat yang dipimpin Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus R. Purnomo bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai persiapan sektor laut menghadapi New Normal.

Pada kesempatan tersebut DPP INSA memberikan beberapa masukan kepada Ditjen Hubla diantaranya mengenai pengurusan perizinan sertifikat dilakukan secara online untuk mengurangi kontak fisik.

Kemudian, pada angkutan RoRo/Penumpang agar pengawasannya lebih diperketat guna mencegah penyebaran Covid-19. Lalu, syarat rapid test untuk kapal-kapal jarak dekat perlu dipertimbangkan karena biayanya lebih mahal dari pada harga tiket.

Perlu adanya informasi dari galangan kapal mengenai kesiapan docking kapal, dan pada bidang angkutan curah diharapkan adanya dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui otoritas pelabuhan agar memonitor kesehatan buruh yang melakukan kegiatan bongkar muat di atas kapal.

Dari DPP INSA tampak hadir Capt. Witono Suprpto, Sekretaris II INSA Hutakemri Ali Samad, Wakil Ketua Umum V INSA Buddy Rakhmadi, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (Orta) INSA Capt. Zaenal A. Hasibuan, Anggota Bidang Orta Leoni Aulina, Anggota Bidang Angkutan Petikemas Dalam Negeri Iksan Ade Kurniawan. (*)

INSA BAHAS TANTANGAN PELAYARAN DENGAN MENPERIN

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, mengikuti rapat bersama dengan Kementerian Perindustrian, Selasa (19/05/2020).

Rapat yang digelar secara virtual itu dipimpin langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membahas sejumlah permasalahan dan tantangan industri nasional di tengah badai Covid-19.

Carmelita yang juga Ketua Umum DPP INSA menyampaikan sejumlah permasalahan yang membelit sektor transportasi misalnya di sektor pelayaran terkait Permendag 79/2019 tentang Izin Impor Barang Tidak Baru masih membebaskan kapal umur 30 tahun yang berakibat Indonesia dibanjiri kapal-kapal tua. Untuk Permendag tahun 2020, disarankan agar sesuai dengan roadmap yang disusun bersama antara INSA-IPERINDO dan Kementerian Perindustrian, yang mana usia kapal disesuaikan dengan jenis kapal maksimal 20 tahun.



Di sektor transportasi darat, Carmelita menyampaikan tentang pentingnya dukungan modal kerja baru baik bagi produksi maupun operatornya. Sedangkan di sektor transportasi udara juga disampaikan perihal impor spare part.

Adapun salah satu permasalahan di sektor galangan kapal yang disampaikan terkait insentif pembebasan PPh Pasal 22 untuk impor sesuai dengan PMK 44/2020 yang pada pelaksanaannya tidak diberikan oleh kantor pajak, padahal industri kapal masuk dalam KBLI 30111 sesuai lampiran Permenkeu.

Selain Menteri Agus, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian, seperti Dirjen Industri Kecil

Menengah dan Aneka (IKMA) Gati Wibaningsih dan Irjen Kemenperin Setyo Wasisto.

Sementara pelaku usaha yang hadir adalah Ketua Umum DPN Apindo Haryadi Sukamadani, sedangkan pengurus DPP INSA yang ikut hadir antara lain, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, WKU VI Trisnadi S. mulia, Witono Soeprpto, Anggota Bidang Angkutan Petikemas Dalam Negeri Budijanto Nurlim, Anggota Bidang Angkutan Luar Negeri Sunu Adji Tarjono dan Dhany Novianto. (*)

DPC INSA SURABAYA BAGIKAN 150 PAKET SEMBAKO DAN 100 APD



Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Surabaya menggelar kegiatan sosial tahap ke-3 dan ke-4 dalam rangka membantu masyarakat terdampak Covid-19 dan petugas medis yang menjadi garda terdepan memerangi Covid-19.

Kegiatan sosial tahap ke-3 yang dilaksanakan 13-14 Mei 2020 ini membagikan 150 paket sembako kepada warga sekitar pelabuhan yang terdampak Covid-19.

Ketua DPC INSA Surabaya Stenven H. Lesawengan dan Sekretaris DPC INSA Surabaya Dwi Agus Wahyono yang menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada masyarakat.

Sedangkan pada tahap ke-4, 26 Mei 2020, DPC INSA Surabaya membagikan 100 paket Alat Pelindung Diri (APD) berupa hazmat, face shield, dan boot cover ke Rumah Sakit (RS) Baptis Kediri. Sebelumnya, pada tahap pertama, 16 April 2020, melalui TNI-AL, DPC INSA Surabaya telah menyalurkan 150 sak beras @5kg, mie instan sebanyak 50 dus, dan 50 APD untuk dikirim ke Indonesia bagian Timur.

Lalu pada tahap kedua, 24 April 2020, melalui RS. Universitas Airlangga, DPC INSA Surabaya menyalurkan dua galon disinfektan, tiga galon dan 10 botol hand sanitizer, sarung tangan medis, lima box masker, 12 carton minuman vitamin c hydromamma, dan 200 paket APD (baju hazmat, face sheild, boot cover) untuk tenaga medis. (*)



INSA FOTO



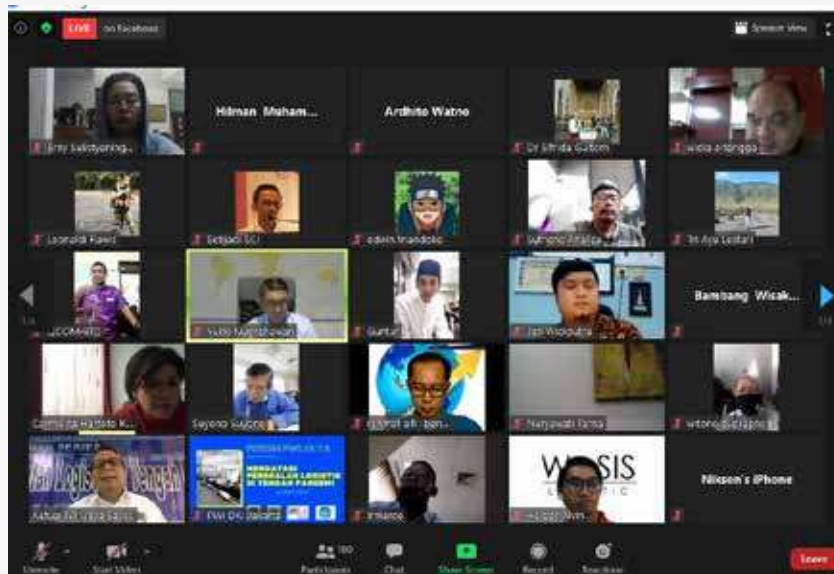
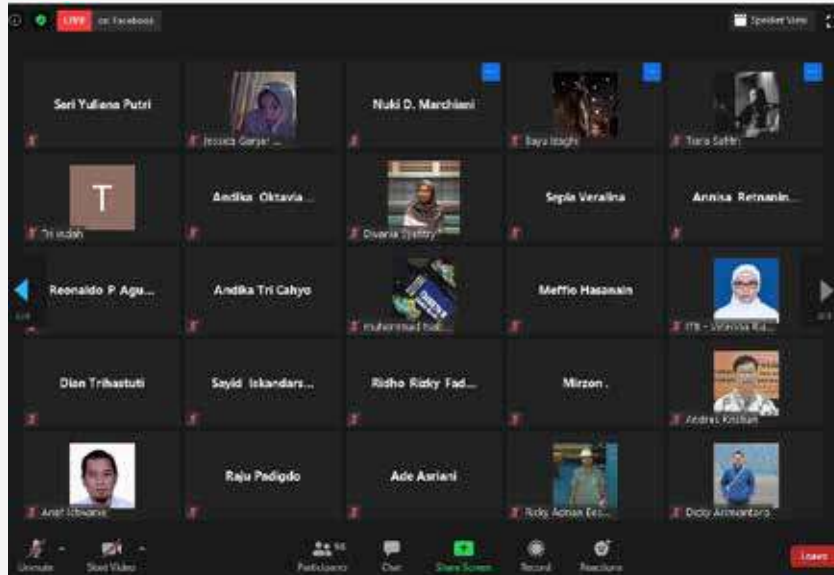
KETUM INSA MENJADI NARSUM DI ACARA DISKUSI NASIONAL

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi pembicara pada acara Diskusi Nasional Mengatasi Persoalan Angkutan Logistik di Kala Pandemi yang digelar secara virtual oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya, Jumat (12/06/2020).

Carmelita mengatakan, pendistribusian logistik saat pandemi Covid-19 selama ini tidak mengalami kendala berarti. INSA bersama Kementerian Perhubungan juga terus berkoordinasi untuk memastikan kapal sesuai jadwal dan berjalan lancar.

Dalam kesempatan itu, Carmelita juga sempat menyinggung bertambahnya biaya operasional kapal dalam penerapan new normal. Hal ini terkait misalnya biaya pengadaan perlengkapan test covid-19 dan perlengkapan medis dan penanganan penumpang dan pencegahan penularan Covid-19.

Selain Carmelita, narasumber lain yang hadir adalah Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrhawan Hanafi dan Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi.

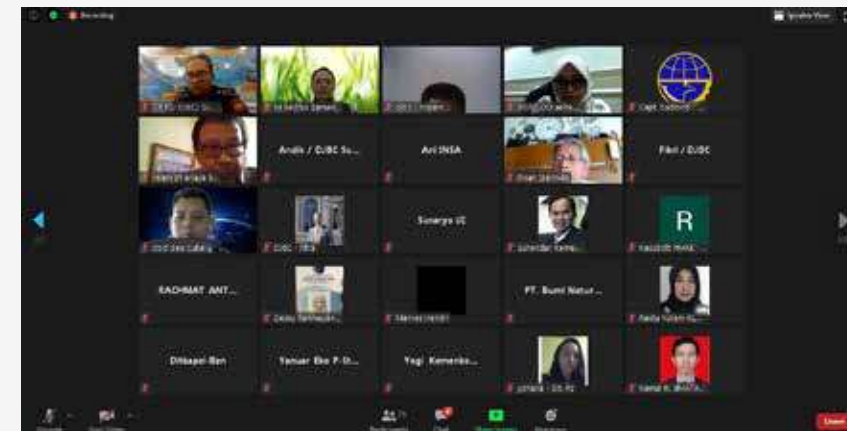


RAPAT PERSIAPAN RATIFIKASI KONVENSI HONGKONG

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) yang diwakili Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Capt. Zaenal A. Hasibuan dan Sekretaris II Hutakemri Ali Samad menghadiri rapat yang diselenggarakan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan via Zoom, Kamis (11/06/2020).

Rapat mengenai Persiapan Ratifikasi Konvensi Hongkong Tentang Penutupan Kapal ini dibuka oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono.

Capt. Zaenal menyampaikan bahwa DPP INSA selalu mendukung setiap kegiatan pemerintah dalam rangka perbaikan industri maritim. Jika perizinan diberlakukan, diharapkan implementasi terhadap kegiatan pemotongan bangkai kapal dalam kegiatan Wreck Removal juga mendapat perhatian. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan,



Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), perusahaan galangan kapal, dan akademisi. (*)

INSA HADIRI RAPAT KEMENDAG

KOLABORASI DAN STRATEGI HADAPI NEW NORMAL

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengikuti rapat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar negeri Kementerian Perdagangan secara virtual, Selasa (09/06/2020).



Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Johni Martha. Agenda rapat adalah dalam rangka silaturahmi dan identifikasi perkembangan isu strategis di sektor logistik khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor.



Adapun pengurus DPP INSA yang hadir adalah Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum INSA I Darmansyah Tanamas, Wakil Ketua Umum VI Trisnadi S. Mulia, Ketua Bidang Angkutan Cair Nick Djatnika.

Rapat ini juga dihadiri oleh beberapa asosiasi dan perusahaan seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO), Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), dan PT Cikarang Inland Port (Cikarang Dry Port). (*)



Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) hadir dalam acara webinar 'Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi Covid-19 & Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Transportasi', yang diselenggarakan Balitbang Kementerian Perhubungan secara daring, Selasa (02/06/2020).

Webinar tersebut dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Keynote Speaker.



Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim berkesempatan menjadi penanggung acara di sesi sektor transportasi laut. (*)

RAPAT BERSAMA BKPM

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menghadiri rapat bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Jumat 29 Mei 2020.

Rapat yang digelar secara virtual ini membahas tentang peluang investasi dan kebijakan di industri perkapalan, roadmap pengembangan industri perkapalan di Indonesia, lokasi potensial industri perkapalan serta potensi mitra lokal untuk investasi asing.

Agenda rapat ini selaras dalam mendukung Pilar Ketiga visi Pemerintah Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas laut yang salah satunya adalah dengan membangun industri perkapalan.

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto bersama pengurus DPP INSA lainnya, seperti Go Darmadi, Darmansyah Tanamas, Faty Khusumo, Nova Y. Mugijanto, Buddy Rakhmadi, dan Nick Djatnika. (*)



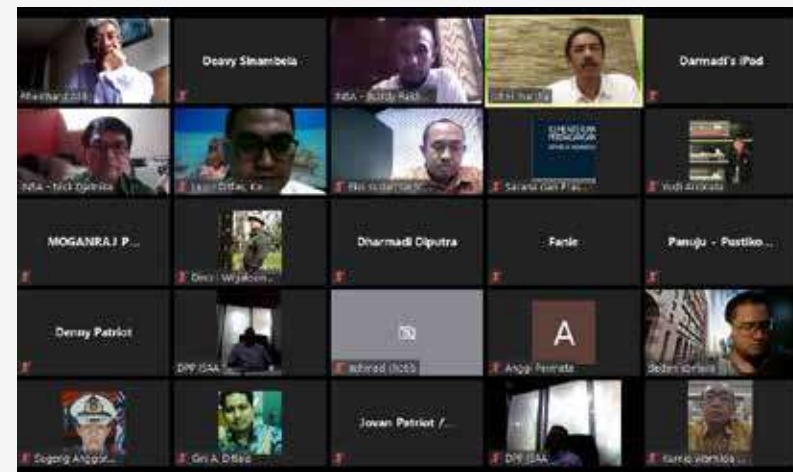
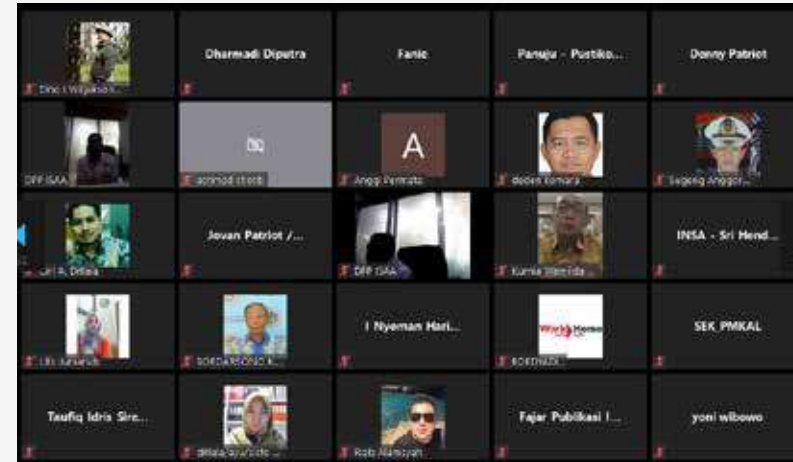
SOSIALISASI TATA CARA PENYAMPAIAN DATA PENGGUNAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL

DPP INSA menghadiri rapat sosialisasi Permendag No. 40 Tahun 2020 dan tata cara penyampaian data penggunaan angkutan laut nasional.

Berbeda dengan rapat sebelumnya, rapat kali ini lebih pada sosialisasi teknis terkait proses pendaftaran perusahaan pelayaran nasional dan kapal pada sistem INATRADE.

Rapat yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ini digelar pada Jumat 29 Mei 2020, pukul 15.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Johni Martha. Sementara pengurus DPP INSA yang hadir adalah Go Darmadi, Buddy Rakhmadi dan Nick Djatnika. (*)





Pelantikan DPP INSA masa bakti 2019-2023 yang dilanjutkan dengan webinar bertema Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju telah berjalan dengan lancar dan meriah. Keberhasilan acara tersebut tidak terlepas dari dukungan para sponsor acara yang telah memberikan dukungan material maupun immaterial.

Untuk itu, DPP INSA mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada para sponsor pada acara Pelantikan DPP INSA masa bakti 2019-2023 dan acara Webinar INSA “Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju”

TERIMA KASIH

PLATINUM SPONSORS

Mobil Gard™

Performance by ExxonMobil



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.
GROUP

GOLD SPONSORS



SOECHI LINES
Quality • Reliability • World Class



ANDHIKA LINES

SUNNY PAINT
MARINE & PROTECTIVE COATING



TRANSOCEAN
COATINGS

SILVER SPONSORS



APTPI
ASOSIASI PERUSAHAAN
TRANSPORASI PERAIRAN
INDONESIA

adaro
LOGISTICS
PT Adaro Services Perkasa



SATU
SISTEM LOGISTIK TERPADU

MERATUS



IPC
PT Pelabuhan Indonesia II (Pareare)
Empowering Trade, Energizing Indonesia

PPI
PT PELAYARAN DAN PERANGKATAN INDONESIA

PMMP



**PELAYARAN
NASIONAL
INDONESIA**

ENERGY
MARINE

